

integrityto

**KRITIK ASYIK
LEWAT MUSIK**



MUSIK
LAWAN
KORUPSI

UTAMA
**KEROYOKAN
BANGUN
KESADARAN**

TATAP MUKA
**DARIUS
SINATHRYA**

TELADAN
**SJAHRUDDIN
RASUL**

ISSN 2086-0919



VOL. 61/XII/
JAN-FEB 2018
www.kpk.go.id

SAKSIKAN KANALKPK TV

Tayangan Informatif & Edukatif

Anti Korupsi

Di : www.kpk.go.id/kanalkpk

Setiap Senin - Jumat

Pukul 10 : 00 - 16:00 WIB

follow kami di  @kanal_kpk



PERINTIS 24
LIBATKAN MASYARAKAT
SUSUN ANGGARAN DESA



UTAMA 12
KEROYOKAN
BANGUN KESADARAN

KOMUNITAS DIRASA MEMILIKI
 PERAN STRATEGIS SEBAGAI
 PENDAMPING MASYARAKAT

ILUSTRASI COVER
 Para pekerja seni dengan
 semangat antikorupsi.
 Grafi: INTEGRITO/IS

10
KANAL
 BERTUALANG DENGAN JUJUR

22
GAGAS
 PASPOR

27
MOZAIK
 PELESTARI WARISAN NEGERI
 LEWAT DIGITALISASI

30
PORTAL
 #NOVELKEMBALI!

38
CENDIKIA
 NAIK JUNJUNG TINGGI
 KESEDERHANAAN

43
CAKRAWALA
 NEGARA DENGAN IZIN USAHA
 TERCEPAT DI DUNIA

46
TELADAN
 SJAHRUDDIN RASUL

53
EKSPRESI
 KITA DI NEGERI KURA-KURA

66
TATAP MUKA
 DARIUS SINATHRYA

69
JEDA
 LETTO

70
SULUR
 KETERANGAN PALSU

MAGANG DI KPK

Pertanyaan : **Noviana Noelando**

Sebelumnya saya mohon maaf apabila email saya ini mengganggu aktivitas KPK.

Saya Noviana, mahasiswa IISIP jurusan Hubungan Masyarakat dengan ini ingin menanyakan apakah saya bisa melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di KPK?

Terus terang alasan saya ingin KKL di KPK karena saya sangat tertarik dengan kinerja KPK, terutama bagian humasnya. Saya salah satu rakyat Indonesia yang sangat mendukung KPK selama ini.

Besar harapan saya kiranya mendapat jawaban dari pihak KPK

Jawaban :

Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini KPK hanya dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan membuat penelitian/skripsi dan tidak dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan melakukan KKL/praktek kerja/magang dikarenakan banyak hal di dalam organisasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa diakses untuk pegawai tetap KPK.

LHKPN PENYELENGGARA NEGARA

Pertanyaan : **Ahmad Syueb**

Bagaimana cara agar saya dapat melihat laporan kekayaan pejabat negara?

Jawaban:

TBN LHKPN para penyelenggara negara dapat langsung diakses di ACCH (Anti Corruption Clearing House) pada aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN), di link berikut <http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn>



@HamidSafrul

Lanjutkan KPK, usut terus siapapun yang korupsi dari kasus apapun, rakyat bersamamu, dan jangan lupa termasuk kasus hambalang, BLBI, century, e-KTP dan yang lain.

@jupiter_jet

Mantap....lanjutkan masih ada kabupaten2 lain di NTT yg seperti itu.....semoga ada penangkapan berikutnya di kabupaten lain.

@Johanhitachi1

Basmi terus pak tikus pemakan uang negara.kpk maju terus

@yohanes_tukan

KPK sbg lembaga negara yg menangani pemberantasan korupsi jgn sampai dilemahkan atau dihancurkan.
#SaveKPK

@awayuqu

Proud for KPK, mantabs jiwa

@persalinanhusus

Berantas terus pencuri2 uang rakyat indonesia

@JuliyahMr

Lanjutkan takbir untuk kpk , klw pjbat udah kena ott ga usah pakai pengacara udah salah ko cari pengacara. Kalah menang pengacara dapet duit

@diajengbhakti

Terima kasih KPK! Sebagai jurnalis saya berada di barisan paling depan utk pemberantasan korupsi. Maju terus KPK!

@Gerro68862100

Rekan-rekan, kita apresiasi kerja KPK, tapi kalau menyangkut kasus korupsi di daerah kita masing-masing, itu menjadi kewajiban kita semua membantu pihak KPK untuk memberikan laporan dan bila perlu kalau ada bukti tertulis, saya yakin teman-teman kpk akan langsung tindak lanjuti dan fokus

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Priharsa Nugraha; **Redaktur Pelaksana:** Tri Artining Putri; **Redaktur:** Zulkarnain Meinardy; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Siti Sharatassyah. **Kontributor:** Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Galuh Ayu Puspita, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout:** MM.Setiawan; **Grafis:** Iman Santoso; **Editing Foto:** Fajar Wirasto; **Pengolahan Data:** Ashani Saroso, Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Dian H Baay, Indra Gunawan, Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; **Sirkulasi** Venny Irliani Amanah. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@kpk.go.id; **Website:** www.kpk.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.kpk

INDONESIA RAYA TANPA SYAIR

“Menenteng biola, Wage Rudolf Supratman mendekati Soegondo Djojopoespito yang tengah memimpin Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Clubgebouw, Kramat Raya 106, Menteng, Jakarta, pada Ahad, 28 Oktober 1928. Wage, begitu ia biasa disapa, menyodorkan secarik kertas berisi lagu yang digubahnya kepada sang Ketua Sidang.”

Judulnya tertulis jelas: Indonesia Raya. Soegondo menganggap syairnya terlalu berisiko karena di sekelilingnya ada polisi Belanda yang mengawasi jalannya kongres saat itu. Besarnya risiko saat itu bukan berarti membuat Soegondo gentar.

Sebagai ketua sidang, ia tetap mengizinkan Wage memainkan lagunya. Tanpa syair. Semua yang mendengar, terpukau. Tak perlu waktu lama lagu itu dikenal di kalangan pergerakan nasional. Begitu juga di kalangan penjajah saat itu: Belanda.

Wage langsung jadi orang yang selalu diburu polisi Hindia Belanda akibat lagu ciptaannya. Tak hanya Indonesia Raya, Wage menciptakan beberapa lagu perjuangan yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda.

Penggesek biola ini kemudian ditangkap saat menyiarkan lagu terakhirnya dengan judul Matahari Terbit pada awal Agustus 1938. Ia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya hingga akhirnya meninggal tak lama setelah dibebaskan, pada 17 Agustus 1938.

Musik memang menjadi salah satu jalan perjuangan yang dipilih Wage.

“Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku,” kata dia.

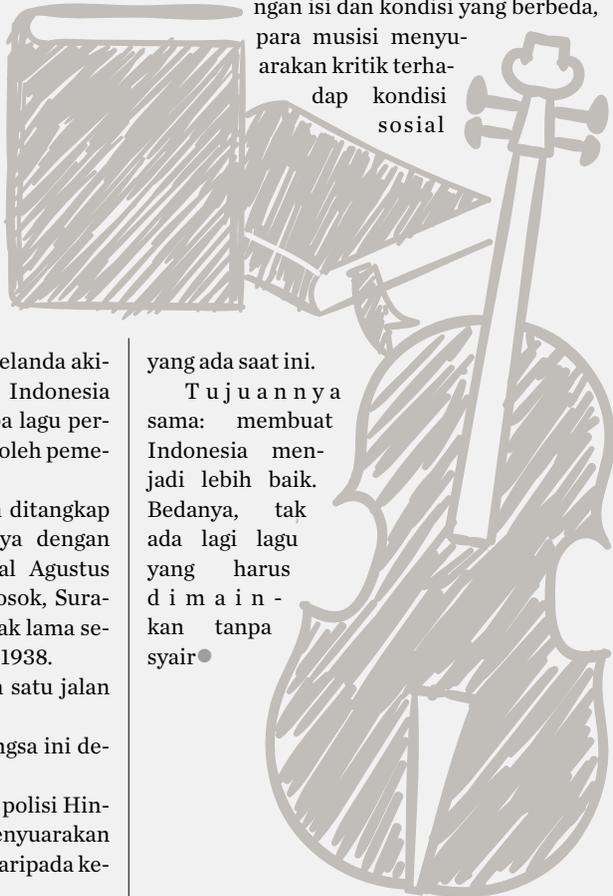
Ia tak peduli dengan ancaman polisi Hindia Belanda saat itu. Baginya, menyuarakan kemerdekaan jauh lebih penting daripada kebebasannya.

“Tubuhku boleh terpenjara, tapi jiwaku bebas merdeka,” ujar Wage saat dipenjara.

Semangat Wage yang luar biasa dalam menyuarakan kemerdekaan masih terus mengalir di karya-karya musisi saat ini. Dengan isi dan kondisi yang berbeda, para musisi menyuarakan kritik terhadap kondisi sosial

yang ada saat ini.

T u j u a n n y a sama: membuat Indonesia menjadi lebih baik. Bedanya, tak ada lagi lagu yang harus d i m a i n - kan tanpa syair ●







NOVEL KEMBALI - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjemput kepulangan Penyidik KPK Novel Baswedan beserta istri usai melakukan pengobatan di Singapura pasca penyerangan penyiraman air keras yang melukai kedua mata Novel (22/02)●





SELAMAT HARI PERS NASIONAL! - Komisi Pemberantasan Korupsi selalu berkolaborasi dengan jurnalis untuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk mencapai negeri yang bebas korupsi, Indonesia membutuhkan pers yang bebas, jujur, dan bertanggung jawab●

KPK GELAR SOSIALISASI KODE ETIK PEGAWAI

Setelah menerima 271 pegawai baru yang berhasil lolos dari 83.613 pendaftar lewat jalur Indonesia Memanggil 12 pada tahun 2017, Biro Sumber Daya Manusia dan Direktorat Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi mengenai kode etik pegawai pada Rabu (31/01).

Dalam kegiatan ini, pegawai baru KPK diberi pemahaman tentang

Peraturan Komisi sebagai pedoman untuk berperilaku dalam bekerja di KPK.

Selain mengenai pedoman perilaku pegawai KPK, Tim Etik Pengawas Internal juga memaparkan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan berbagai pelanggaran dari mulai pelanggaran ringan, sedang, dan berat ●

DISKUSI PEMBERANTASAN KORUPSI, KPK SAMBANGI ICW



INTEGRITO/SS

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata Timur pada Senin (05/02). Basaria hadir bersama Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari KPK untuk berdiskusi dengan salah satu organisasi yang mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Basaria, dialog informal menjadi salah satu cara yang baik untuk berkomunikasi. Maksud ke-

datangannya ke ICW adalah untuk berdiskusi mengenai misi bersama yaitu pemberantasan korupsi.

Dalam diskusi tersebut, selain bisa bertanya langsung dengan salah satu pimpinan KPK, anggota ICW juga menyampaikan banyak masukan untuk KPK dalam rangka keberlangsungan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah KPK harus lebih mengawasi partai-partai politik yang retan melakukan tindak pidana korupsi, apalagi tahun ini menjadi tahun politik dimana banyak celah untuk korupsi ●



INTEGRITO/SS

KPK-CSO BERSINERGI JAGA SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari Civil Society Organization (CSO) sektor Sumber Daya Alam. Pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang dan perwakilan dari beberapa CSO di sektor SDA di gedung Merah Putih KPK (02/02).

Perwakilan CSO tersebut terdiri dari 10 organisasi tingkat nasional yang terdiri dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Kemitraan Partnership for Governance Reform, Sawit Watch, Transparansi untuk Keadilan (TUK), Yayasan Auriga, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Forest Watch Indonesia, dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA). Kesepuluh organisasi tersebut memiliki jaringan diseluruh Indonesia yang bergerak di sektor Sumber Daya Alam.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas target di tahun 2018 yaitu memutus mata rantai korupsi di sektor Sumber Daya Alam. Setiap perwakilan organisasi berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pimpinan KPK. Ke depannya, pertemuan ini akan menciptakan kerja sama antara masyarakat sipil dan KPK untuk menyelamatkan Sumber Daya Alam di Indonesia ●

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima Audiensi dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Charles Darwin University yang tergabung dalam sebuah kegiatan yang bernama Short Course Transnational Organized Crime pada Rabu (31/01).

Sebanyak lebih dari 25 peserta yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan dosen FHUI dan Charles Darwin University mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk mengenal secara dalam cara kerja KPK mulai dari koordinasi, supervisi, *monitoring*, pencegahan, dan penindakan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memaparkan kinerja KPK. Syarif menjelaskan bahwa KPK tak hanya memiliki pengalaman dalam penindakan korupsi. "Kami juga terus melakukan upaya pencegahan di segala sektor," kata dia.

Selain mendatangi KPK, gabungan mahasiswa dan dosen FH UI dan Charles Darwin University ini juga mendatangi pihak kepolisian dan perwakilan dari PBB di Indonesia untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut ●

KPK TERIMA AUDIENSI UNIVERSITAS INDONESIA & CHARLES DARWIN UNIVERSITY



INTEGRITO/SRP

CEGAH KORUPSI DI PILKADA SERENTAK



INTEGRITO/PRO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pertemuan untuk mencegah politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Tujuan lain adalah untuk mengingatkan pada calon kepala daerah untuk tidak melakukan praktik ilegal saat kampanye dan meraup suara.

"Tak hanya kepada kepala daerah definitif, peringatan itu juga disampaikan KPK kepada Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bersama empat Pj dan Pjs Gubernur di KPK, Jakarta, Senin, (26/2).

Laode mengatakan KPK telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun ini dan mencegah politik uang. Untuk itu, Laode minta supaya Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepada para penjabat gubernur yang baru untuk turut mencegah terjadinya politik uang ●

KPK GELAR KELAS KURIKULUM DISIPLIN POSITIF

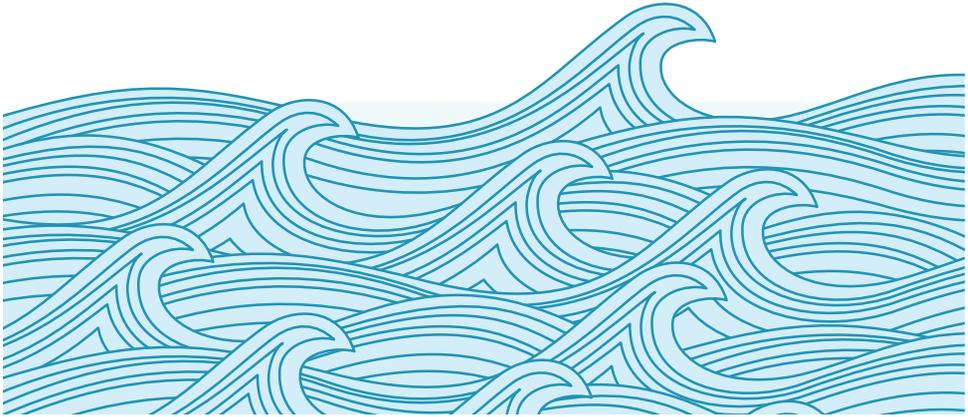
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Yayasan Keluarga Kita dalam membuat acara Kelas Kurikulum Disiplin Positif yang diselenggarakan Kamis (15/02/2018) di gedung KPK Jl. HR Rasuna Said Kav. C1.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan orang tua agar mendidik anak-anak mereka dengan pola disiplin tanpa hukuman dan sogokan. Kegiatan ini dipandu oleh Najjeela Shihab dan tim ACLC KPK.

Rangkaian kegiatan Kelas Kurikulum Disiplin Positif ini terdiri dari sesi berbagi cerita Rangkul, sesi nonton bareng Rangkul, pemberian materi pencegahan korupsi lewat buku cerita anak dan film antikorupsi untuk anak ●



INTEGRITO/SRP



SANDIWARA RADIO CATATAN BIMA

Bertualang Dengan Jujur

Pramoedya Ananta Toer menulis di buku Rumah Kaca, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Sudah kah anda menulis? Karena kini menulis tak lagi sulit. Di zaman kertas atau buku tak lagi penting untuk menulis, sejatinya setiap orang bisa menulis. Lantas menulis apa? Di zaman begitu banyaknya informasi, tulisan bisa apa saja. Tak harus pandai, tak harus berpendidikan tinggi, siapa saja bisa menulis, paling tidak untuk diri sendiri.

Bima memulainya dengan catatan bima. Catatan perjalanan selama berpetualang ke berbagai tempat di tanah air. Lokasi perjalanannya, siapa saja orang yang ditemuinya, kejadian menarik atau petuah penting yang diperolehnya selama berpetualang, dituliskannya dalam buku catatan. Awal perjalanannya bertemu Bening, gadis desa yang tegar dan jujur di Desa Wonosegoro terangkum apik dalam catatan bima, Setulus Hati Bening.

Di Desa Jambewani, Bima menorehkan kisah pencemaran limbah. Desa yang seharusnya wangi seperti namanya itu, dibekap aroma busuk menusuk. Orang-orang seperti si kecil Talu yang gigih walau kehidupannya serba terbatas, Lismi perempuan tegar yang ditinggal suaminya, Ratmi yang boros dan suka morotin suaminya ikut terpatri dalam catatan perjalanan Bima.

Berpetualang walau di negeri sendiri bukan berarti tidak menemukan tantangan. Tapi Bima

tetap tenang menghadapi berbagai konflik yang hadir disepanjang petualangannya karena prinsip hidup yang diajarkan sang Ibu kepadanya, “Jika kita jujur dimana saja, kita akan merasakan kebaikannya.”

Kini, perjalanan Bima sampai di pulau dewata. Kisah apa yang akan ditoreh Bima di Sanur dan Nusa Penida? Ikuti terus Sandiwara Radio Catatan Bima di KanalKPK setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 11.00 WIB hanya di *streaming* radio kanal.kpk.go.id

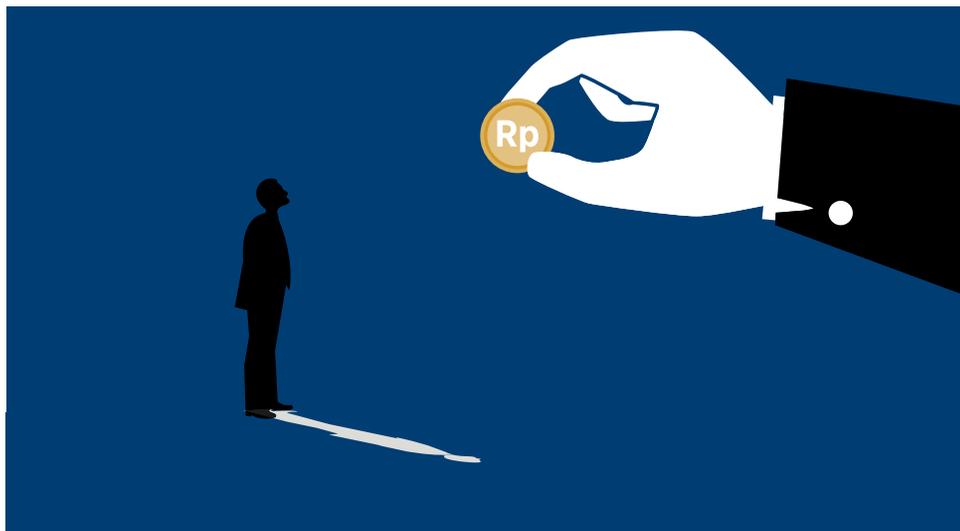
Ikuti juga kuis Sandiwara Radio Catatan Bima via twitter @kanal_kpk. Jawab pertanyaannya dengan *mention* ke @kanal_kpk melalui format nama (spasi) umur (spasi) jawaban (spasi) (tagar) SandiwaraRadio (spasi) (tagar) CatatanBima (spasi) @KPK_RI. Bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan kuis dengan benar, akan mendapatkan kaos Sandiwara Radio Catatan Bima.

Nah, untuk mendapatkan jawaban yang benar caranya gampang sekali, yaitu mendengarkan terus Sandiwara Radio Catatan Bima di KanalKPK. Jangan sampai ketinggalan dengar kuisnya ya!●



IKUTI SERIAL SANDIWARA RADIO KANAL KPK

| Judul | Tayang |
|--------------|--|
| Catatan Bima | Setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 11.00 WIB |



BINCANG KANAL

Cara Mudah Laporkan Kekayaan Melalui e-LHKPN

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Pada Desember 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi e-LHKPN berbasis *website* yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran e-LHKPN tersebut, sangat menyederhanakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Perbedaan signifikan bisa terlihat, dengan adanya aplikasi ini, penyelenggara negara tidak perlu menggunakan *hardcopy* dokumen sertifikat aset-asetnya, dan tidak perlu mengirimkan atau datang ke kantor KPK untuk melapor.

“Dengan e-LHKPN, mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pelaporan harta kekayaan,” ujar Djonet Hartono, Vice President Human Capital Organizational Effectiveness Telkom. LHKPN bukan sekadar pengguguran kewajiban pelaporan harta oleh penyelenggara negara. Laporan ini bisa dija-

dikan indikator integritas seorang penyelenggara negara. Ini akan sangat berguna untuk mempertimbangkan Kepala Daerah yang akan dipilih oleh masyarakat.

Pada awal 2018, KPK kedatangan banyak pengunjung dari calon Kepala Daerah beserta tim suksesnya yang ingin melaporkan harta kekayaannya. Pelaporan harta kekayaan ke KPK merupakan salah satu syarat administrasi bagi calon Kepala Daerah, dan masyarakat dapat dengan mudah memantau harta calon Kepala Daerah dari e-LHKPN. Bila ada ketidaksesuaian dari data kekayaan Kepala Daerah, masyarakat bisa dengan mudah melaporkan ke KPK sehingga

Indonesia bisa dipimpin oleh Kepala Daerah yang bersih dan jujur.

“Pelaporan LHKPN di Kemenkeu sangat penting, karena Bu Menteri sangat *concern* dengan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani, salah satu caranya yaitu dengan e-LHKPN. Dalam hal promosi atau mutasi pegawai, kami selalu mensyaratkan para calon harus sudah lapor LHKPN. Jika belum lapor, maka namanya akan dicoret” kata Eko Purbono, Kepala Bagian Penghargaan Penegakan Disiplin dan Pensiun Biro SDM Kementerian Keuangan ●



SAKSIKAN HANYA DI KANAL.KPK.GO.ID

| Judul | Tayang |
|---------------|-------------------------------|
| Bincang Kanal | Setiap Selasa pukul 12.10 WIB |

PELIBATAN KOMUNITAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

KEROYOKAN BANGUN KESADARAN

BERAWAL SEBAGAI *TRIGGER MECHANISM* HINGGA KERINDUAN UNTUK MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG AGAR TERWUJUD PERUBAHAN BAGI MASYARAKAT MENJADI TUJUAN UTAMA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PELIBATAN KOMUNITAS. KOMUNITAS DIRASA MEMILIKI PERAN STRATEGIS SEBAGAI PENDAMPING MASYARAKAT.



SEDEKAH ROMBONGAN-

Seorang ibu menggendong anaknya sehabis melakukan pemeriksaan oleh dokter untuk kembali ke rumah singgah yang disediakan oleh Komunitas Sedekah Rombongan Yogyakarta.

INTEGRITO/SRP

Sejak tahun awal berdirinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melibatkan komunitas dalam gerakan antikorupsi. Namun belum dikerjakan secara spesifik. Masuk tahun kedua, KPK membentuk unit kerja Community Development (Comdev) yang berada pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat untuk membidangi secara khusus penanganan pelibatan komunitas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kala itu Yogyakarta menjadi kota pertama yang dijadikan percontohan untuk pelibatan komunitas dalam gerakan antikorupsi. Bersama-sama melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan puluhan komunitas hingga melahirkan gerakan Jujur Barenagan.

Meski dinamakan gerakan Jujur Barenagan, namun nilai yang ingin dikampanyekan tetap saja mencakup sembilan nilai integritas yang dianut KPK, yaitu: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil.

“Kami cari padanan kata yang kira-kira mencerminkan antikorupsi tapi masyarakat gampang mengunyahnya, akhirnya keluarlah kegiatan Jujur Barenagan itu,” ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko, kepada Integrigo.

Gerakan Jujur Barenagan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Yogyakarta, berjalan dalam rangkaian acara parade dengan ragam budaya yang disajikan begitu semarak layaknya pesta rakyat. Berhamburan memadati

jalan-jalan di Yogyakarta mulai dari Alun-Alun Utara menuju Kepatihan. Pesertanya hampir 1.500 orang, berasal dari 35 komunitas, antara lain komunitas seni, sosial, budaya, hobi, termasuk Bregodo Keraton, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Desain kegiatan pelibatan komunitas ini menitikberatkan penyadaran bahwa gerakan antikorupsi ialah milik masyarakat dan merupakan kebutuhan semua pihak bukan hanya KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Komunitas yang dilibatkan pada dasarnya sudah melakukan gerakan antikorupsi dalam *passion*-nya masing-masing yang secara tidak langsung turut mengampanyekan nilai-nilai integritas.

Contohnya saja komunitas Sedekah Rombongan dan Gusdurian di Yogyakarta. Dalam kegiatannya mereka tidak bicara soal anti-korupsi secara harfiah, tidak juga bicara soal tindak pidana korupsi. Namun dalam pergerakannya, mereka sudah melakukan pendampingan ke masyarakat. Hal tersebut melekatkan masyarakat bahwa kegiatan antikorupsi berbicara soal banyak hal, bahkan masyarakat sudah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, tidak berucap dusta, memberi tumpangan kepada seseorang yang kesulitan, bertanggung jawab dalam pekerjaan, dan lainnya.

Pada akhir tahun sebagai penutupan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2014, KPK juga melakukan pelibatan komunitas dan masyarakat melalui Konser GROPYOKAN KORUPSI :

“Intinya agar memberikan manfaat lebih baik kepada masyarakat paling bawah dan mereka bisa merasakan kehadiran KPK lebih nyata”



Pahala Nainggolan,
Deputi Bidang Pencegahan KPK

Proklamasi Rakyat Anti Korupsi, pada Desember 2014.

Dari Yogyakarta berlanjut ke kota kembang, Bandung. Di Bandung, gerakan yang dilakukan sudah semakin masif. Keterlibatan komunitasnya pun sangat progresif, mulai dari guru, kawan-kawan difabel, bahkan hingga ibu-ibu yang biasa bekerja di dapur yang berkreasi membuat musik dengan bunyi-bunyian alat masak tersebut. Ada pula komunitas berkebun yang bicara soal kejujuran tanaman.

“Kalau mau melihat kejujuran, ya lihat tanaman, karena pohon mangga tidak mungkin berbohong menghasilkan buah yang lain selain mangga itu sendiri,” ujar Sujanarko menirukan pembicaraan komunitas berkebun.

Kampanye nilai yang digalakkan di Bandung ditambah satu karena bagi Bandung ada satu nilai yaitu sabar yang menurut mereka menjadi penting. Kadang orang menyebrang sembarangan karena kurang sabar, politisi *nggak* sabar meniti karir dari bawah, mereka lalu *nyogok* dan melakukan segala cara. Tak sabar, dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi.

Memasuki 2016 hingga 2017, pelibatan komunitas yang dikerjakan KPK semakin berkembang dan mencoba lebih terstruktur dengan menggunakan teknik pemetaan. Tanpa melepaskan gerakan-gerakan kampanye nilai yang pada akhirnya dikerjakan sendiri oleh komunitas yang sudah pernah bekerja sama dengan KPK. Sebut saja “Seni Indonesia Berkabung”, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh gabungan akademisi dari Universitas Sanata Dharma, Institut Seni Indonesia, Universitas Duta Wacana, Universitas

Gadjah Mada, dan seniman Yogyakarta.

“Gerakan tersebut dibuat ketika KPK sedang dalam masa krisis, itu juga yang buat dari teman-teman Jujur Barengan,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Selain itu ada pula buku *Mengunyah Geram* (Seratus Puisi Melawan Korupsi) yang merupakan produk dari gerakan Puputan Melawan Korupsi yang diadakan pada Festival Anti Korupsi Bali, Desember 2017.

Dalam perubahan konsep pelibatan komunitas, KPK memilih masyarakat Provinsi Riau sebagai wilayah percontohan. Selama dua periode dalam setahun, KPK menjalankan kegiatan ini bersama-sama dengan Forum Maruah (Masyarakat Anti Rasuah). Periode pertama berlangsung pada 24-28 Juli 2017 di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelelawan. Dilanjutkan periode kedua pada 14-18 Agustus 2017 di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Meranti.

“Riau kami balik konsepnya, jika ada komunitas yang tadinya bergerak investigatif, teriak-teriak, atau lebih ke budaya, nah kita sinkronkan gerakannya untuk mau mengawal gerakan masyarakat,” kata Pahala. Mereka dipakai sebagai fasilitator masyarakat untuk mengawal kualitas pelayanan publik, mengajarkan masyarakat untuk tidak berteriak-teriak dalam menyampaikan pendapat.

Pemilihan Provinsi Riau dalam upaya mendorong pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi dikarenakan Riau menjadi salah satu rekomendasi KPK yang dimandatkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017.

Sejak 2010 – 2016 tercatat 36 kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan di Provinsi Riau, hingga akhirnya KPK menetapkan Riau menjadi daerah rawan korupsi serta memerlukan prioritas utama untuk pendampingan dalam memberantas korupsi di pemerintah daerah. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, komunitas, CSO, dalam pencegahan korupsi perlu dibangun dalam memastikan perbaikan pelayanan publik diberbagai sektor, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran secara transparansi, efisien dan akuntabel.

“Kami ingin masyarakat bisa ngerasain *nih* perubahannya. Intinya agar memberikan manfaat lebih baik kepada masyarakat paling bawah dan mereka bisa merasakan kehadiran KPK lebih nyata,” ujar Pahala.



ISTW

SOSIALISASI - Demi mewujudkan pemerataan wilayah yang bebas dari korupsi, KPK tak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa di wilayah Indonesia.

SOSIALISASI ADALAH KUNCI

KAMPANYE NILAI TELAH DILAKUKAN, ISU PELAYANAN DASAR PUBLIK PUN DITERAPKAN. BANYAK TEMUAN TERUNGKAP, REKOMENDASI DISUSUN DENGAN SIGAP. PROGRAM YANG TERINTEGRASI JADI HARAPAN. MISINYA SATU, UNTUK KESEJAHTERAAN DI MASA MENDATANG.

Berangkat dari Yogyakarta dan Bandung membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin optimistis mengembangkan pelibatan komunitas dalam model yang jauh lebih spesifik menasar kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, penyebaran kampanye nilai integritas yang sudah dilakukan tak lantas diabaikan. Hal tersebut malah sudah berjalan dengan sendirinya di kalangan komunitas tanpa perlu lagi pendampingan intensif dari KPK.

Model baru tersebut diterapkan sebagai upaya perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan isu pelayanan dasar publik seperti; pelayanan pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah), pelayanan kesehatan, dan penggunaan dana desa.

Provinsi yang pertama dijadikan contoh ialah Riau. Pertimbangannya atas dasar Renaksi (Rencana Aksi) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 yang salah satu komitmennya ialah memperbaiki pelayanan publik.

Dengan mengatasnamakan Forum Marwah (Masyarakat Riau Anti Rasuah), KPK dengan CSO dan juga komunitas setempat yang dijadikan fasilitator, turun langsung untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait pelayanan publik tersebut. Hasilnya memilukan, komitmen hanya sebatas komitmen. Masyarakat tak terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan dasar publik yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti pengobatan gratis atau kebutuhan alat sekolah.

Kata mereka serempak, "Kami tidak

tahu.” Sebut saja, Pak Sutarno, bukan nama sebenarnya, datang ke Puskesmas untuk berobat di luar jam operasional, Ia kemudian ditagih uang untuk berobat. Pemberi layanan itu mengatakan, “Jika jam operasional (masih) gratis, kalau sudah lewat harus bayar,” ungkap Sutarno. Tak hanya itu saja, obat yang diberikan pun selalu ditanyakan kepada masyarakat untuk memilih apakah mau obat yang gratis atau obat yang kualitasnya mereka jamin lebih bagus.

Secara tidak langsung, pemberi layanan mengabaikan hak warga mengenai pelayanan gratis. Hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan pemberi layanan semisal Puskesmas yang memang dianggarkan pemerintah untuk memberikan pelayanan gratis kepada seluruh warga negara dengan menunjukkan KTP atau kartu kesehatan BPJS.

“Bahkan kaya suku-suku asli itu secara interpersonal mereka tidak bisa berbaur dengan komunitas lain, mereka dibidang aneh *lah*, eksklusif *lah*, mereka mengucilkan diri. Akhirnya ya tidak punya KTP, ketika sakit, mereka tidak punya *privillage* yang sama dengan yang punya KTP.

Menurut desa, mereka yang tidak mau ke kita, seharusnya kan jangan mereka yang datang tapi pemerintah yang sosialisasi dong,” ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Sujanarko.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Nurman, sebagai fasilitator yang memang putra daerah, Ia mengerti benar apa yang dirasakan masyarakat desa terutama masyarakat adat di sana. “Saya pikir data desa juga harus lebih terorganisir dan terus diperbarui, karena memang banyak masyarakat itu yang sudah meninggal tapi masih ada, yang pindah, atau malaharganya ada tapi tidak tercatat.”

Hari berganti hari, tim masih bergerak melakukan pemetaan permasalahan sambil menemukan kasus-kasus tak terduga di lapangan. Namun, permasalahan demi permasalahan sudah berhasil dicarikan letak simpulnya. *Stakeholders* terkait pun sudah mengakui adanya kesalahan yang kurang dioptimalkan, semuanya terungkap dalam *workshop* yang pada saat itu disaksikan pula oleh seluruh warga desa. Benang merahanya, sosialisasi jadi masalah utama.

Ketidaktahuan masyarakat desa atas pelayanan publik yang tersedia di wilayahnya membuat dampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka yang tanpa kita sadari hanya karena persoalan kecil bernama so-



sialisasi.

Di daerah perkotaan mungkin sosialisasi dianggap persoalan remeh, apalagi untuk mendatangi kantor pelayanan publik untuk mendapatkan informasi tertentu. Maka pada akhirnya banyak kita temui sosialisasi berbentuk digital yang dibuat oleh pemerintah, publik dapat tahu sebuah informasi melalui telepon pintar.

Namun hal tersebut tak berlaku bagi masyarakat adat Talang Mamak, kecamatan Rakit Kulim, Riau. Bagaimana mau berpikir digital, untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja mereka tak punya. Atau ada beberapa yang punya KTP dan BPJS tapi tidak tahu cara menggunakannya.

Bahwa ada biaya persalinan gratis di dusunnya sehingga mereka tak harus mengambil risiko kehilangan anak dengan menyerahkan persalinan ke dukun. Dan bahwa ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga mereka bisa menyekolahkan anaknya tanpa perlu keluar uang bahkan untuk buku dan alat tulis yang sudah tersedia gratis.

Hingga persoalan di mana mereka harus melanjutkan hidup yang sampai detik ini ba-



ISTW

nyak suku asli tidak memiliki hak untuk tinggal di wilayah adatnya karena terkatung Surat Keterangan Tanah (SKT).

Upaya KPK dengan melibatkan komunitas dalam pelayanan dasar publik di daerah Riau ini membuka banyak hal mengenai sistem administrasi yang masih carut marut dan belum terintegrasi, juga masalah keterbukaan informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Temuan serupa kerap terjadi di daerah lain terutama daerah terpencil. Akses dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi alasan minimnya pengawasan. Alhasil korupsi bisa jadi lahan basah untuk penyelenggara negara yang menjabat di daerah yang masih banyak wilayah terpencil.

Melalui sambungan telepon, Integrito berbicara dengan Nurman mengenai pengelolaan dana desa di sana. Ia mengatakan, pemerintah justru melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini konsultan untuk mengelola dana desa ketimbang melibatkan warganya sendiri. Publik masih di anggap 'bodoh' untuk ikut andil. "Padahal banyak yang pandai dan dapat memahami itu kalau saja pemerintah mau melibatkan."

BERSAMA KOMUNITAS -Upaya prefentif KPK dengan melibatkan komunitas untuk sama-sama mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Benang merahnya, sosialisasi jadi masalah utama

Nurman menjelaskan, semua permasalahan tersebut sudah dirinci dengan detail, survei dilakukan di wilayah tertentu selain di daerah secara umum. Di tingkat desa, dibuatkan rancangan tindak lanjut melalui rumusan Rekomendasi Forum Marwah.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Sujanarko, mengatakan sudah ada beberapa hasil Rekomendasi Forum Marwah yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Saat ini sudah masuk anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau untuk masalah pelayanan publik hasil rekomendasi kita. Jadi 2018 ini kita kembali ke sana dan sudah dianggarkan pemerintah untuk mereka fokus menangani ini," kata pria yang biasa disapa Koko ini.

Tahun 2018 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membuat desain *tools* untuk mengukur temuan dan capaian yang terjadi di Provinsi Riau. "Kami sedang mengilmiahkan metode yang sudah kita lakukan di Riau supaya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada pakemnya, ada teorinya, ada rujukannya, sehingga dari metode itu kita punya *tools* untuk memantau," ujar Koko.

Ada empat daerah lain yang pada tahun 2018 ini akan dikunjungi oleh KPK untuk isu pelayanan dasar publik, di antaranya ialah: Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

"Setiap kota mau kita *trigger* dengan *best practice* yang ada di Riau. Misinya itu tadi, bahwa membawa isu antikorupsi itu berdampak terhadap masyarakat. Seperti yang sudah di ceritakan, dia miskin, dia nggak tahu apa-apa, tapi sekarang bisa terlayani dengan baik," kata Koko ●

MUKJIZAT UNTUK ANAK KETIGA

DUA KALI TAK BISA MERASAKAN MENJADI SEORANG IBU. PENYEBABNYA MELAHIRKAN DI TANGAN DUKUN BERANAK. TIM MARUAH SIAGA BERGERAK. SANG BAYI KETIGA SELAMAT. MEREKA BILANG INI MUKJIZAT.



FOTO-FOTO: ISTW

Wanita berusia 25 tahun ini adalah Melisca, nasibnya sungguh malang, sudah dua kali Ia dan suaminya menanti seorang buah hati. Dua kali Tuhan menganugerahkan mereka untuk bisa hamil, namun dua masa kehamilannya itu harus rela Ia hadapi bahwa bayi mereka lahir ke dunia tanpa embusan napas.

Bagi seorang yang menantikan keturunannya, pasti kegagalan dalam persalinan membuat trauma dan putus asa, apalagi itu terjadi dua kali. Namun Ia dan suaminya, Suhaimi tetap berusaha, mereka kembali dipercaya Sang Kuasa untuk kehamilan ketiga.

Saat itu forum Maruah tengah mewawancarai warga di Desa Talang Durian Cacar untuk pendataan masalah agar bisa dibuatkan rumusan rekomendasi.

Adalah Meta – perwakilan GIZ – yang mengetahui dari salah satu warga, mengata-

kan bahwa ada wanita yang hendak melahirkan dan sudah dua kali anaknya meninggal karena bersalin di dukun.

Mendengar hal tersebut, Meta pun memanggil tim dan segera mengunjungi rumah wanita itu. “Kita datang ke situ hari pertama, dan warga yang kami wawancarai tidak menyampaikan bahwa ada yang mau melahirkan di belakang dengan kondisi yang anak satu dan dua-nya tidak selamat,” ujar Nurman.

Sesampainya di rumah Suhaimi, terlihat jelas perut istrinya sudah membesar dan terkapar lemas. Ia bilang sudah sembilan bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan. Meta menggali kisah apa yang terjadi di balik kehamilan ketiga Melisca. Sungguh memilukan, nyatanya Suhaimi memiliki kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) namun Ia tak mengerti bagaimana cara menggunakannya.

Yang Ia tahu, berobat ke Puskesmas pasti

harus membayar, apalagi untuk melahirkan. Ia sadar dirinya tak memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan sang istri. Karena itu, dua kali ketika istrinya melahirkan selalu meminta pertolongan dukun beranak. Di samping jaraknya tidak sejauh ketika mereka harus ke Puskesmas, melahirkan di dukun beranak tak perlu keluar uang.

Persepsi “harus membayar” itulah yang terbangun di benak masyarakat setempat, bukan hanya Suhaimi saja. Persepsi itu kemudian mengubur harapan mereka bahwa ada pelayanan kesehatan gratis di desa mereka, dan pada akhirnya mereka kembali melakukan pengobatan secara adat kuno yaitu pergi ke dukun.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah justru beranggapan masyarakat di desa tersebut yang memang masih mengagungkan adat sehingga masih percaya untuk melakukan pengobatan ke dukun. Lagipula, menurut pemerintah, untuk menempatkan seorang bidan di dusun yang sangat terpencil terlalu berisiko dengan melihat faktor kepercayaan masyarakat adat di sana.

Padahal kenyataannya, bukan masyarakat adat yang tidak mau berobat ke medis, tapi karena ketidaksiediaan tim medis di Pus-tu (Pusat Kesehatan Pembantu) di dusun mereka. Bagaimana mereka mau berobat kalau yang tersedia tim medis hanya ada di Puskesmas, yang letaknya di Kecamatan Rakit Kulim dan jaraknya hampir satu hingga dua jam menuju ke sana dengan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan.

Kebetulan, saat mengunjungi rumah Suhaimi ada Pak Herman, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ia kemudian langsung menelepon Puskesmas terdekat untuk meminta bantuan. Setelah menunggu beberapa jam, datanglah ambulan dengan tiga orang bidan ke rumah Suhaimi. Pada hari itu juga Suhaimi dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Pematang Reba.

“Waktu kita di situ katanya itu Suhaimi sudah sehari semalam belum bisa keluar itu anak,” ujar Nurman dengan nada takjub. Setelah ambulan datang dan tiba di RSUD dengan penanganan yang begitu intensif oleh dokter spesialis kandungan, sang bayi mungil Suhaimi pun lahir dengan tangis begitu kencang.

Suhaimi dan istri serta keluarga yang datang menemani mengucapkan rasa syukur dan terima kasih begitu dalam karena Ia

Keberhasilan penanganan Suhaimi jadi salah satu *best practice* yang terjadi selama program pelibatan komunitas di Provinsi Riau.



(akhirnya) bisa menggendong sang buah hati di pelukannya dengan selamat tanpa kurang suatu apapun.

Kisah ini bicara mengenai sepotong kartu kecil bertuliskan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Di beberapa daerah di seluruh Indonesia, kartu kecil ini dianggap kartu sakti bagi mereka yang membutuhkan. Mereka bisa mendapatkan obat gratis saat sakit, bisa mendapat imunisasi gratis untuk anak-anak mereka, bisa mendapat kontrol kehamilan gratis hingga persalinan gratis.

Tapi kartu kecil ini bisa merenggut nyawa seseorang, hanya karena ia teronggok tak berfungsi ketika sang pemilik tidak mengetahui untuk apa kartu itu. Betapa pentingnya sosialisasi di sini. Bahkan untuk sosialisasi yang dianggap hal sepele seperti penggunaan kartu Jamkesda Suhaimi.

Keberhasilan penanganan Suhaimi jadi salah satu *best practice* yang terjadi selama program pelibatan komunitas di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Setelah program selesai dan tim Maruah kembali ke ibu kota, Nurman menjelaskan bahwa sudah ada bidan yang masuk ke dusun tempat Suhaimi tinggal. Mukjizat terjadi untuk Suhaimi dan kini kisahnya menjadi pembuka jalan bagi tata kelola yang jauh lebih baik di Provinsi Riau ●

NURMAN, Fasilitator Pelibatan Komunitas di Provinsi Riau

“MASYARAKAT MASIH GELAGAPAN SOAL KORUPSI”

Pelibatan komunitas sangat berpengaruh dalam proses pendekatan komunikasi ke masyarakat adat Talang Mamak, Kecamatan Rakit Kulim, Provinsi Riau. Di sana, masyarakat masih tabu dengan korupsi apalagi perempuan tidak banyak mempunyai peran bahkan untuk menyuarakan pendapat. Perlu peran komunitas yang dapat menjembatani, berikut wawancara Integrito dengan Nurman melalui sambungan telepon:

Bagaimana awalnya dilibatkan sebagai fasilitator?

Kita koordinasi cukup lama, akhirnya kita ke sana (desa-desa). Awalnya masyarakat cukup kaget menerima keberadaan kita, karena kita ke sana sebagai tim Marwah tapi tahu ada dari KPK.

Apa yang membuat kaget?

Mendengar kata korupsi kalau di daerah, warga gelagapan. Efeknya *shock* terapi sekali, bahkan ke desa lain. Ibaratnya mereka ikut kelojotan padahal belum didatangi. Kemungkinan karena sebelumnya ada kasus korupsi mengenai tower internet di 19 desa di sana.

Pada akhirnya apa yang terjadi?

Kita sampaikan mau melihat mengenai pelayanan publik. Baru mereka mau terbuka dan kita lakukan beberapa *workshop* kecil-kecilan. Di situ mereka bicara, pemberi layanan pun kita hadirkan, dan mereka mengakui apa yang diutarakan warga

Memang masalah apa yang terjadi di pelayanan kesehatan di sana?

Misalnya bidan desa. Di Rakit Kulim itu kan adat yang lebih utama, terutama untuk kesehatan (dukun beranak). Ada kegelisahan dari dinas untuk menempatkan bidan di dusun. Dinas beranggapan bahwa masyarakat adat di sana tidak mau berobat ke medis. Sebaliknya, masyarakat adat menganggap mereka mau datang ke bidan tapi tidak ada bidan di sana.

Saling salah-salahannya?

Nah di situ akhirnya kita adakan *workshop*, semua kita undang, ketemu titik simpulnya yang harus diurai.



FOTO-FOTO: ISTW

Apa yang paling banyak dikeluhkan masyarakat?

Kesehatan dan pendidikan.

Ditilep?

Kalau ditilep saya rasa 20 persen, rata-rata 80 persen itu informasi yang tidak sampai ke telinga masyarakat (kurangnya sosialisasi).

Lalu temuan apalagi, dana desa tidak?

Dana desa juga, kepala desa masih melibatkan konsultan untuk mengelola dana desa sebagai pihak ketiga. Seharusnya masyarakat yang dilibatkan, ini sama sekali enggak, masyarakat masih dianggap *nerimo*, dianggap tidak berkemampuan, padahal banyak yang pandai jika saja mau melibatkan mereka.

Apa yang mereka dapatkan di workshop, ada kesepakatan yang terjadi?

Hasilnya bidan disana sudah masuk. Yang kemarin diinginkan bidan itu sudah ada. Mungkin bagi kita itu kecil tapi bagi mereka

itu berharga sekali.

Masalah ketersediaan bidan itu karena kasus Melisca kah?

Itu mungkin Tuhan juga memberikan jalan ya ke Melisca yang dimana kita bisa menyelamatkan anaknya. Jadi sebenarnya kita kesana tanpa perencanaan ada kejadian itu, kita datang hari pertama dan warga yang kami wawancarai tidak menyampaikan bahwa ada yang mau melahirkan dengan kondisi anak pertama dan keduanya tidak selamat. Hari berikutnya, kita semua sigap termasuk mbak Meta dari GIZ, responsif sekali. Dia tanya 'Kamu punya BPJS nggak?' ternyata mereka punya Jamkesmas, tapi mereka tidak tahu itu kartu apa.

Punya tapi tidak tahu, memang tidak ada sosialisasi?

Nggak ada sosialisasi kalau di daerah, apalagi di dusun-dusun. Makanya waktu itu kebetulan ada Pak Herman dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau lalu diterangkan dan suaminya, Suhaimi, serta keluarganya mau mengerti akhirnya mau di rujuk ke RSUD. Pak Herman lalu telepon ke Puskesmas terdekat minta bantuan dan datang ambulans dengan tiga bidan langsung dirujuk ke RSUD Indrasari Pematang Reba. Waktu kita di situ katanya Melisca sudah sehari semalam belum bisa keluar itu anak.

Mukjizat, barangkali anaknya menunggu kedatangan ambulans ya?

Hehe, mungkin jadi. Di RSUD, Jamkesmasnya berlaku, anaknya ditangani dengan baik dan selamat. Setelah itu kasus Melisca kita jadikan sebagai contoh konkret ke daerah-daerah lain.

Terkait Dukcapil dan dinas sosial dong?

Jadi kesusahan kita itu ngurusin masyarakat adat itu begitu *mbak*. Mereka semua ini tidak punya apa-apa nih, mereka hanya nikah secara adat, mereka tidak pernah ke catatan sipil, jadi ketika mereka ingin mengakses layanan yang membutuhkan identitas ya tidak bisa. Masyarakat di Talang Mamak belum diakui pemerintah, ketika kita coba melakukan pembuatan KTP, KK, Akte dan segala macam pemerintah bilang harus ada sejarahnya dulu mengenai masyarakat adatnya. Tokoh adat sudah melakukan itu sebenarnya, tapi tidak ada tindak lanjutnya lagi. Saya khawatir bahwa Disdukcapil berada di

"...kita adakan *workshop*, semua kita undang, ketemu titik simpulnya yang harus diurai."

Nurman, Fasilitator Komunitas



tengah-tengah antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan yang ada di lapangan. Saya takutnya itu.

Kebijakan pemerintah pusat yang seperti apa?

Mengenai MA mengabulkan aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Karena kan masyarakat adat tidak mau untuk menuliskan agama di KK dan KTP.

Oke. Lalu ada lagi yang ingin disampaikan terkait temuan yang terjadi di sana?

Ada, masalah wilayah. Jadi di sana itu mereka menganut *tatak tikal ambang benawah, singki kalo kalo*, artinya dimana bekas perladangan hasil dari tebas, tebang, disitulah wilayah adat dan tempat hidup orang Talang Mamak baik komunal maupun individu. Dan tidak boleh ada yang ganggu, itulah pertanda bahwa tanah tersebut telah bertuan. Tapi sekarang wilayah adat sangat sempit, karena ada tekanan, misalnya konsesi perusahaan, adanya pendatang, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penggunaan lahan. Mereka itu kan hidup tergantung sama perladangan berpindah, jadi wilayah ini sangat penting, hak-hak mereka sudah banyak "diserobot."

Berawal dari identitas juga ujungnya itu ya?

Iya, untuk pembuktian kalau lahan itu milik mereka itu tidak ada. Dari pemerintah harus ada bukti lahan, tapi bagaimana mau bikin SKT (Surat Keterangan Tanah) kalau KTP saja tidak punya. Dokumen tidak punya tapi mereka mau sekolah, mau berobat, nah itu bagaimana? Itu susahnya ●

PASPOR

Kadang kita membutuhkan alasan yang agak murahan untuk melakukan sesuatu yang mulia. Kemuliaan itu sendiri terlalu tinggi, kita tak sanggup junjung, maka kita perlu alasan yang agak dangkal...

Jemari saya menekani tombol gawai, mencari kantor imigrasi yang masih membuka pendaftaran antrean paspor *online*. Saya hendak ke luar negeri untuk suatu festival sastra. Sial! Semua kanim di Jakarta penuh. Sampai 2020 pun tak ada jadwal. Saya cek kota lain. Nah, besok ternyata ada slot, tapi di Madiun atau Kediri!

Lima tahun lalu, membuat paspor via *online* sangat mudah. Waktu itu, pelayanan baru ini rasanya seperti keajaiban reformasi. Teringat era Suharto. Segala kantor dipenuhi calo. Wajah mereka umumnya tebal oleh pori-pori yang melebar, mungkin karena *pengap* dalam kantor yang masa itu penuh asap rokok dan tidak ber-AC. Mereka *lah* yang bergerak dari satu ke lain meja sambil memeluk setumpuk map, membujuk para pegawai yang lamban, agar mendahulukan klien masing-masing. Warga hanya bisa pasrah, sambil kipas-kipas dan berharap calonya lebih licin dari calo lain.

Kini, wajar jika saya cemas seandainya reformasi birokrasi yang sempat berbuah perlahan rontok dan kita harus mengalami lagi masa gelap. Kekhawatiran itu bukan tak beralasan. Di Tanah Abang Jakarta, percaloan lapak di luar gedung pasar mulai marak. Genangan sampah di pintu air Manggarai, yang dulu sempat lenyap, sekarang sering muncul. Saya cemas, jangan-jangan harus kembali pada calo.

Pada paspor kegundahan berlapis. Ia merangkum identitas saya ketika berada di luar negeri. Diam-diam, orang seperti saya lebih kerap pergi ke luar negeri untuk mewakili Indonesia—setidaknya mewakili dunia sastra dan gagasan Indonesia. Kami, para seniman, mungkin tidak dikirim secara resmi oleh pemerintah seperti para atlet. Kami justru dipilih oleh lembaga dan festival luar negeri sebagai wakil Indonesia.

Rasa mewakili Indonesia itu tak bisa ditanggalkan. Karena itu, akut pula rasa ingin bangga pada Indonesia.

Sejujurnya saya lebih senang jika bisa membawa kabar baik dari negeri tercinta. Misalnya, “Oh, sekarang Indonesia sudah demokratis. Kebebasan berbicara dilindungi.” Sayangnya, yang bebas bicara semaunya hanyalah yang mayoritas atau yang bisa mengerahkan kekuatan fisik. “Oh, Indonesia sudah tidak sekorup dulu.” Yang lebih tepat, korupsi di Indonesia tak lagi terpusat seperti dulu. Tetapi, saya tetap bangga bahwa perjuangan melawan korupsi tidak patah, sekalipun sungguh berat. Paling rendah, saya ingin bisa bilang, bahwa di Indonesia untuk mengurus dokumen kita tidak perlu menyogok lagi.

Di masa Suharto, para sastrawan yang





Oleh : **Ayu Utami**

Novelis; Direktur Literature & Ideas Festival @Salihara

mewakili Indonesia di pahami sebagai datang dari negeri terbelakang. Kami diharapkan bercerita tentang bagaimana bertahan di bawah rezim yang korup, bagaimana situasi kebebasan ekspresi atau emansipasi wanita di masyarakat yang tradisional dan agamis. Lantaran memang masih terganjal halangan tadi, kami kerap tak bisa masuk ke dalam isu yang lebih canggih yang telah diteroka para intelektual dan seniman negeri lain.

Di masa reformasi, sebetulnya saya ingin bisa membawa kabar baik tanah air. Ingin bisa bilang bahwa kisah-kisah eksotis tentang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, itu telah menjadi sekadar sejarah. Ingin bisa bilang, kami telah melewatinya dan belajar darinya—seperti Eropa belajar dari perang agama dan perang dunia, atau Amerika Seri-

kat belajar dari perbudakan, perang saudara, atau perang melawan mafia.

Saya ingin bisa bilang bahwa Indonesia adalah bangsa yang, sejak nenek-moyang, memiliki sastra dan gagasan yang cemerlang. Dengannya bangsa ini telah membangun tradisi spiritualitasnya, yang mengatasi dan merangkumi perbedaan. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah rumusan dari tradisi spiritual yang istimewa ini. Kini, bangsa ini juga sedang membangun modernitasnya dalam pemerintahan dan birokrasi yang mencoba bersih-profesional. Saya ingin bisa bilang begitu. Tapi kita tahu, gerakan ke arah sebaliknya juga terjadi. Di Indonesia sekarang juga terjadi radikalisasi agama yang bersifat anti-kebhinekaan. Pada saat yang sama juga naik-turunnya reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi.

Dalam mengurus paspor, semua itu kembali hadir. Putus asa dalam usaha mendaftar *online*, saya memakai sosial media. Saya mendapat tanggapan cukup cepat dari akun Ditjen Imigrasi.

Sistem paspor *online* terpadu kini memang belum seoptimal tiket *online* kereta api. Para pendukung percaloan masih bisa mengganggu. Setiap kanim akhirnya mencoba mengatasi masalah dengan strategi masing-masing. Saya akhirnya bisa mengurus paspor, tapi juga melihat orang-orang yang mengantri tanpa nomer dan menyusup di sela antrian resmi.

Seandainya Indonesia adalah kantor imigrasi. Ada banyak petugas yang profesional, manusia yang ingin berbuat baik dan tangkas. Tapi kita juga melihat sistem yang masih bocor, oknum yang bermain, warga yang memilih menyogok. Ada kemajuan, tapi perjalanan masih panjang, dan ancaman terus membayang. Menuju cita-cita mulia, Indonesia yang bebas korupsi, mungkin alasan superfisial seperti rasa ingin bangga akan tanah air bisa membantu kita bergerak ke sana. Setiap kita adalah wakil Indonesia. Buatlah Indonesia yang membanggakan●



TRANSPARANSI ANGGARAN DESA MALLARI, SULAWESI SELATAN

LIBATKAN MASYARAKAT SUSUN ANGGARAN DESA



FOTO: FOTO: ISTW

KEPALA DESA MEMBANGUN KEPERCAYAAN LEWAT TRANSPARANSI DAN MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DALAM MEMBUAT ANGGARAN DANA DESA. MASYARAKAT DAPAT MENGETAHUI ANGGARAN DESA SECARA RINCI.

Sebuah baliho berukuran 3x4 meter dengan latar belakang putih menjadi pemandangan menarik saat hendak melintasi gapura yang menjadi pintu masuk Desa Mallari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bukan sebuah gambar politikus dengan slogan atau iklan produk air mineral merek baru.

Isi dalam baliho itu adalah sebuah tabel yang berisikan angka-angka dalam rupiah yang merupakan informasi alokasi anggaran dana desa secara rinci.

Program transparansi ini dibuat oleh sang Kepala Desa, Andi Wahyuli. Sejak awal menjabat ditahun 2010, Wahyuli mulai mengajak warga untuk bermusyawarah dalam menentukan alokasi anggaran dana desa. Awal-

nya terasa sulit, karena untuk mengubah pola pikir masyarakat desa pasti ada saja yang sulit menerima sistem yang baru.

“Perilaku orang beda-beda, ada yang cepat dan lambat menerima,” ujar wanita 49 tahun itu.

Memimpin lima dusun dengan 2.930 penduduk, Wahyuli dibantu oleh para Kepala Dusun. Mereka keliling ke seluruh dusun untuk mengajak masyarakat bermusyawarah dan bertanya secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masing-masing dusun.

Sistem transparansi anggaran ini merupakan bentuk konkret dari istilah “dari rakyat untuk rakyat”. Setelah mendapatkan dana desa dari pemerintah, Wahyuli dan staf kepala desa berkeliling ke lima dusun yang ada

di desanya, lalu melakukan rapat di masing-masing dusun untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan prioritasnya.

Sebelum itu, masing-masing kelompok dalam dusun tersebut juga sudah melaporkan apa yang menjadi prioritas kebutuhannya. Kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok wanita, pria, lansia, difabel, dan anak-anak.

“Jadi kami menganggarkan kegiatan itu berdasarkan data dan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyuli.

Setelah mendengar dan mencatat apa yang menjadi prioritas masing-masing dusun, diadakan rapat besar yang sering disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang digelar di Balai Pertemuan Kantor Desa. Dalam rapat tersebut, akan hadir 10 orang sebagai perwakilan dari setiap dusun.

Staf Bagian Keuangan Desa Mallari, Mega, mengatakan semua perencanaan yang sudah sampai ke tahap Musrenbang adalah yang sudah diprioritaskan oleh lima dusun tersebut.

“Jadi semua perwakilan dari dusun akan memperjuangkan prioritasnya di rapat besar itu,” ujar Mega.

Kepala desa akan melibatkan 50 orang perwakilan masyarakat untuk membuat anggaran desa. Dalam pertemuan berkala itu, semua kebutuhan prioritas yang sudah diajukan akan diatur dan akan dipilih kembali untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak.

“Jadi bukan kepala desa yang menentukan berapa anggarannya” ungkap Mega.

Keputusan tersebut juga sudah melalui pertimbangan dan survei dari tim teknis yang langsung terjun ke lapangan untuk bertanya ke berbagai pihak terkait untuk mengetahui perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan.

Setelah anggaran tersebut rampung, kepala desa akan membuat laporan. Laporan yang berisi tabel tersebut akan dipajang di kantor kepala desa, di setiap pintu masuk dusun, dan di persimpangan jalan.

“Semua warga dan tamu yang datang bisa melihat dengan jelas, semua transparan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Mega.

Kepala desa kembali berkeliling ke lima dusun yang ada di Desa Mallari untuk mensosialisasikan penyerapan anggaran di tahun ini. Laporan anggaran tersebut tidak hanya disampaikan saat rapat, namun juga disampaikan di kegiatan ibu-ibu PKK seperti arisan atau pengajian, pertemuan kelompok difabel, dan penduduk lanjut usia.

Selain perencanaan anggaran, kepala desa juga menyampaikan dengan jelas dan rinci penggunaan dana desa selama setahun dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan tersebut diserahkan ke setiap kelompok yang terdapat di 5 dusun di desa Mallari untuk dibacakan di sela-sela kegiatan kelompok.

Transparansi anggaran juga dilakukan dengan memajang laporan tersebut di kantor kepala desa lengkap dengan foto dan jumlah



ANGGARAN DESA- Musyawarah pemetaan untuk kebutuhan kelompok difabel di Desa Mallari, Sulawesi Selatan.



PELATIHAN - Pelatihan padat karya untuk kelompok perempuan, lansia, dan difabel di Desa Mallari menggunakan anggaran desa tahun 2018.

anggaran yang keluar untuk kegiatan tersebut. “Jadi apa yang kita anggarkan setahun berjalan sudah ada disitu” kata Mega.

Bahkan, masyarakat bisa melihat langsung rincian pengeluaran dan foto proses pembangunan dari nol hingga seratus persen.

Karena sistem ini, Desa Mallari sudah dianggap menjadi desa percontohan karena menerapkan program transparansi anggaran. Dari 328 desa yang ada di Kabupaten Bone, sudah lebih dari 10 desa yang mencontoh sistem transparansi anggaran yang ada di Desa Mallari.

Salah satu warga Desa Mallari, Supriadi, merasa puas dengan kegiatan yang transparan itu. Masyarakat sangat antusias karena dilibatkan dalam menganggarkan dana desa.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa di pertahankan, meski kepala desanya berganti, kalau bisa kepala desa yang baru harus bisa membuat ini menjadi lebih baik” ujar Supriadi.

Menurut dia, sebelum Wahyuli membentuk program transparansi anggaran ini, masyarakat tidak pernah diajak untuk berpartisipasi secara langsung. Semua pemetaan anggaran untuk Desa Mallari ditentukan langsung oleh pemerintahan tingkat kabupaten. Anggaran yang digelontorkan untuk Desa Mallari *pun* sangat minim sehingga tidak banyak perubahan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat desa.

“Kalau dulu yang dilakukan dari anggaran itu hanya membangun jalan atau infrastruktur yang sebenarnya tak kami butuhkan,” ujar Supriadi.

“Mudah-mudahan sistem ini bisa dipertahankan, meski Kepala Desanya berganti...”

Supriadi, Warga desa Mallari

Ini terjadi karena dulu semua yang dilakukan di Desa Mallari hanya menjalankan program dari kabupaten. Semuanya dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua program merupakan kebutuhan masyarakat.

Sebelum program transparansi anggaran berjalan, pemerintah kabupaten hanya memanggil kepala desa, ketua RT dan RW. Masyarakat tak dilibatkan, sehingga tidak mengetahui dengan pasti berapa besar penyerapan anggaran yang dilakukan tahun itu.

“Sangat berbeda dengan yang sekarang, masyarakat diikutsertakan jadi semua kalangan terlibat dan semua lapisan masyarakat menikmati hasilnya,” ujar Supriadi.

Penerapan sistem transparansi anggaran ini membuat Desa Mallari diganjar penghargaan sebagai desa inklusif dan terintegrasi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Kepala desanya mendapat penghargaan kepala desa teladan dari Pemerintah Kabupaten Bone, meraih penghargaan sebagai desa dengan pengelolaan keuangan desa terbaik dari Pemerintah Kabupaten Bone. Bahkan, Wahyuli akan berangkat ke Tiongkok untuk pertukaran kepala desa se-ASEAN●



FOTO: FOTODIARY

Hokky Situngkir mengumpulkan lebih dari seribu tujuh ratus jenis batik dari seluruh Indonesia selama enam bulan pada tahun 2005. Ia bukan kolektor batik. Hokky tengah melakukan penelitian tentang batik Indonesia. Hasilnya, pola luar biasa terbentuk dari jenis-jenis batik yang ada. Jenis batik yang ada bahkan memperlihatkan kekerabatan di seluruh Indonesia.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan, tapi juga bisa dibuktikan secara ilmiah,” kata Hokky kepada *Integrato*, awal Januari lalu.

Penelitian Hokky mengenai batik ternyata menarik bagi United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization (UNESCO). Mereka mendatangi kantor

SOBAT BUDAYA

PELESTARI WARISAN NEGERI LEWAT DIGITALISASI



Bandung Fe Institute tempat dimana Hokky membuat semua penelitiannya. Dari situ muncul semangat untuk melestarikan budaya Indonesia lewat pendataan budaya.

“Ini enggak boleh punah, sayang banget kalau punah,” kata dia.

Dari keyakinan ini, Hokky memberanikan diri membuat perpustakaan digital untuk mengumpulkan informasi mengenai budaya di Indonesia pada tahun 2008. Ternyata kebutuhan dan semangat berbagi informasi mengenai budaya cukup tinggi.

Terbukti dengan kumpulan perpustakaan digital hasil inisiasi Hokky menjadi cikal bakal Komunitas Sobat Budaya tiga tahun kemudian. Sobat Budaya adalah komunitas yang peduli terhadap budaya tradisional. Komunitas ini berkegiatan untuk menjaga, melestarikan, dan mendata budaya Indonesia. Digitalisasi perpustakaan budaya adalah program utama komunitas ini.

Lewat Gerakan Sejuta Data Budaya, ribuan data diunggah ke situs budaya-indonesia.org. Ribuan data perpustakaan budaya itu adalah hasil kerja seribu relawan di seluruh Indonesia dan lebih dari 3.500 *submitters* yang ada di seluruh Indonesia.

Komunitas ini dibentuk dengan visi mendorong pelestarian dan pengembangan serta pendataan budaya Indonesia. Selain melestarikan, pendataan budaya ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap budaya Indonesia.

Berbagai cara dilakukan oleh Sobat Buda-

ya dalam misi pendataan budaya Indonesia. Mulai dari menyalin data yang ada di buku, internet, dan data dari seluruh masyarakat Indonesia mengenai budaya di daerahnya masing-masing hingga ekspedisi dan wawancara langsung dengan ketua adat di daerah yang sedang didatangi.

Para relawan yang melakukan ekspedisi diberikan berbagai pembekalan materi dan pengetahuan terlebih dahulu. Mereka harus riset mengenai budaya yang akan mereka teliti. Mereka juga harus mengikuti standar buku panduan pendataan budaya yang dibuat oleh Hokky Situngkir atas permintaan UNESCO. Buku panduan ini juga sudah dipakai di Jepang dan Vietnam.

Selain Gerakan Sejuta Data Budaya, komunitas ini memiliki beragam kegiatan, mulai dari *roadshow*, *talkshow*, seminar, dan Prodak Kreatif. Ada juga kegiatan *Lalang Kode Nusantara* untuk menyosialisasikan hasil penelitian budaya yang tertuang dalam buku Kode-Kode Nusantara ke-12 kota, dan Tekno-culture Tour.

Tekno-Culture Tour menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian. Tur tersebut bertujuan untuk memberikan perspektif baru bagi generasi muda dalam memandang budaya. Dari pandangan budaya dekat dengan hal yang kuno dan mistis menjadi pengetahuan manfaat yang dijelaskan secara ilmiah dan rasional.

Ketua Komunitas Sobat Budaya, Siti Wulandari menggambarkan kegiatan ini dengan tiga kata: Science, Culture, and Travelling. Komunitas ini berharap kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini memberikan pandangan baru terhadap masyarakat.

“Bahwa melestarikan budaya tidak melulu harus mengikuti les tari, melukis, bermain gamelan dan sebagainya,” kata perempuan yang biasa disapa Wulan ini.

Dengan menginformasikan budaya di lingkungan, bisa punya pengaruh ke proses pelestarian budaya. Wulan berharap Komunitas Sobat Budaya bisa bergandengan tangan dengan pemerintah. Salah satu kerja samanya adalah dengan melindungi budaya Indonesia yang selama ini masih mengupayakan hak paten dengan mendaftarkan ke UNESCO.

Soalnya, komunitas ini sudah mengumpulkan lebih dari empat ribu budaya yang semuanya ingin didaftarkan patennya ke UNESCO. Dalam pendataan hak paten ke UNESCO, dibutuhkan waktu dua tahun dan biaya satu miliar rupiah setiap budaya.



Basis data budaya ini, kata Wulan, sangat bermanfaat untuk menangkal klaim dari negara lain. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang berhasil diselamatkan dari kurungan penjara karena basis data yang dimiliki komunitas ini.

Adalah Desak Suharti, seorang pengrajin ukiran yang mengekspor karyanya keluar negeri. Namun ternyata karyanya dilarang karena sudah dipatenkan oleh negeri lain. Sobat Budaya membantu advokasi kasus Desak dan mengusut bahwa karya yang dipatenkan oleh orang asing itu dibeli di Indonesia.

Komunitas bentukan Hokky Situngkir ini kemudian memberi data sah bahwa Desak adalah keturunan pengrajin ukir yang asli, bukan menjiplak.

“Berkat data ini, Desak dinyatakan tak bersalah dan bebas dari hukuman,” kata Siti.

Manfaat lain dirasakan oleh salah satu pelajar, Alvina. Perempuan yang masih duduk di bangku sekolah tersebut merasa sangat terbantu dengan adanya situs budaya-indonesia.org untuk mengumpulkan data kayon di seluruh Indonesia untuk penelitiannya.

“Enggak banyak yang menyediakan data

budaya Indonesia lengkap dan sudah digital begini,” kata perempuan yang berdomisili di Bandung tersebut.

Sebagai pendiri, Hokky Situngkir berharap semakin banyak yang memanfaatkan hasil yang dibuat oleh Komunitas Sobat Budaya, dan lebih banyak lagi generasi muda yang berkontribusi dalam pendataan budaya Indonesia.

Menurut dia, generasi muda bisa melestarikan budaya dengan cara yang modern. Cukup dengan mendokumentasikannya, merapikan arsipnya, dan membangun basis data.

“Itu semua bisa hanya menggunakan *gadget*”, kata pria kelahiran 1978 itu.

Salah satu data yang menarik adalah sebanyak 10 persen percakapan di dunia ada di Indonesia. Namun setiap 3 tahun, 10 persen bahasa itu punah karena sudah tidak ada lagi orang yang menggunakannya. Itu baru data bahasa daerah. Belum termasuk budayanya.

“Kalau punah, kita yang rugi sebagai bangsa,” kata Hokky●



INTEGRITO/SRP

NOVEL KEMBALI - Penyidik KPK Novel Baswedan menyapa para simpatisan dan awak media yang telah menunggu kedatangannya (22/02).

#NOVELKEMBALI

Perjuangan Berantas Korupsi Takkan Berlangsung Sebelah Mata

Tepat 10 bulan 11 hari pascapenyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali ke tanah air pada Kamis (22/02/2018) setelah menjalani pengobatan di Singapura selama kurang lebih sembilan bulan

Tepat pukul 10.50 WIB pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Novel Baswedan bersama keluarganya tiba di Bandara International Soekarno Hatta, Banten. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif beserta segenap rekan-rekan kerja yang merupakan pegawai KPK turut menyambut kepulangan Novel di Bandara. Dari bandara, Novel langsung ke kantor KPK yang berlokasi di jalan Kuningan Persada secara beriringan.

Di pelataran gedung Merah Putih KPK telah dipadati para karyawan KPK, alumni pimpinan KPK, jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Lebih dari seribu orang berkumpul dan sangat antusias menyambut kedatangan Novel Baswedan.

“Saya ingin ini juga menjadi penyemangat untuk semua pegawai KPK aktivis, dan penegak hukum yang dalam tugas memberantas korupsi.”

Novel Baswedan, Penyidik KPK

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua masyarakat yang telah mendukung KPK dan memberi dukungan kepada Novel pascapenyerangannya. Ia juga menyampaikan harapannya mengenai penangkapan pelaku penyerangan Novel.

“Mudah-mudahan yang menyerang Novel segera ditemukan dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujar Syarif.

Novel Baswedan juga menyatakan bahwa peristiwa penyerangan terhadap dirinya tidak akan membuat dirinya takut dan menjadi le-

mah.

“Saya ingin ini juga menjadi penyemangat untuk semua pegawai KPK, aktivis, dan penegak hukum yang dalam tugas memberantas korupsi. Tentu hal ini bisa menularkan semangat yang sama, sehingga semakin berani dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi,” ujar Novel.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPK jilid 3, Abraham Samad menyampaikan bahwa pegawai KPK jangan takut karena melihat kejadian yang menimpa Novel.

“Apa yang menimpa Novel tidak boleh sedikitpun menciutkan nyali seluruh pegawai KPK,” ujar Abraham Samad.

Kegiatan menyambut kepulangan Novel Baswedan di tanah air ditutup oleh penampilan spesial dari salah satu band indie yaitu Efek Rumah Kaca dengan menyanyikan tiga buah lagu yaitu Sebelah Mata, Di Udara, dan Mosi Tidak Percaya. Lagu-lagu tersebut berisikan kritik sosial yang sesuai dengan kisah KPK dalam menghadapi koruptor●



INTEGRITO/SS

BENEFICIAL OWNERSHIP - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kanan) bersama perwakilan beberapa negara membahas regulasi dan aturan untuk Beneficial Ownership yang cocok diterapkan di Indonesia.

KAJIAN BENEFICIAL OWNERSHIP

Finalisasi Kajian Transparansi Kepemilikan Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi pengajuan Peraturan Presiden mengenai Beneficial Ownership pada September 2017 lalu. Rencana pengajuan Perpres ini didesain sedemikian rupa dalam bentuk kajian dengan bantuan kerja sama dari USAID.

Akhir Januari lalu, KPK dengan USAID, dan juga Ernst and Young Indonesia (EY) sebagai konsultan KPK, serta Sekretariat Negara, mengadakan pertemuan finalisasi kajian berupa rekomendasi-rekomendasi untuk beberapa instansi terkait Beneficial Ownership (BO) di Gedung Merah Putih, KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai Beneficial Ownership yang sudah dijalankan di empat negara, yaitu Inggris,

Singapura, Italia, dan Spanyol. Di empat negara tersebut, regulasi mengenai BO diatur pada peraturan yang setingkat dengan Undang-Undang, sedangkan di Indonesia sedang menunggu ditanda tangannya PerPres oleh Presiden Joko Widodo.

“Aturan ini penting untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (31/01).

Kajian BO ini juga merekomendasikan supaya kementerian-kementerian teknis seperti ESDM, pertanian, kehutanan, dan lingkungan membuat suatu peraturan teknis di masing-masing kementerian untuk mengumpulkan informasi-informasi BO yang terkait dan berada pada sisi regulasi.

Definisi BO sendiri dari bebe-

“Aturan ini penting untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.”

Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK

rapa pengertian di semua negara selalu mengatakan orang terakhir. Jadi BO ialah orang terakhir yang menerima manfaat dari sebuah korporasi. Sedangkan mengenai kriteria BO di keempat negara dibagi berdasarkan jenis korporasinya, begitupun dengan Indonesia. Instansi berwenang untuk mengumpulkan informasi BO, di setiap negara kecuali Singapura ada sebuah instansi yang mengumpulkan informasi BO. Di Singapura informasi itu di pegang oleh masing-masing perusahaan namun apabila diminta maka perusahaan tersebut harus memberikan.

Dari keempat negara tersebut semua sudah sentralisasi informasi BO kecuali Singapura.

KPK sendiri dalam kajian BO mencoba membayangkan menjadi dua tahap untuk pengumpulan informasi BO, pertama jadi tahapan kementerian yang mengesahkan korporasi atau kementerian teknis, yang kedua ialah pengelolaan informasi.

Pemilihan Singapura di karenakan struktur kepemilikan perusahaannya mirip di Indonesia. Inggris merupakan negara pertama yang menggunakan sentralisasi pencatatan BO●

PENYERAHAN BARANG RAMPASAN KE KEMENKUMHAM

Dua Mobil Untuk Per lancar Tugas Rupbasan Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dua mobil kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua mobil yang diserahkan adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan menjadi milik negara. Rencananya, kedua mobil tersebut akan dimanfaatkan untuk mobil operasional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara.

Dua barang rampasan ini berupa satu unit Toyota Hilux 2,5 G Double Cabin warna hitam tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp149.450.000 dan satu unit Avanza 1.3 G warna abu-abu tahun 2011 dengan nilai perolehan Rp59.281.000.

Keduanya berasal dari terdakwa yang berbeda. Toyota Hilux dirampas dari terpidana Syahrul Raja Sempurnajaya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan makam bukan umum di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mobil lainnya, Toyota Avanza, dirampas dari terpidana Djoko Susilo dalam tindak pidana korupsi simulator Surat Izin Mengemudi.

Penyerahan mobil tersebut dilakukan di gedung Merah Putih KPK dalam acara Serah Terima Hibah Barang Rampasan yang dihadiri oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Wahiddin dan Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK, Irene Putrie. Selain itu juga turut hadir pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan KPK.

"Ini adalah salah satu upaya KPK melakukan upaya pengembalian aset negara dari terpidana



INTEGRITO/SRP

MOBIL RAMPASAN- Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK Irene Putrie (kanan) dan Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara, Wahidin (tengah), dalam acara penyerahan dua mobil rampasan KPK ke Bagian Lapas Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). (30/01)

korupsi," kata Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK, Irene Putrie, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Januari 2018.

Irene mengatakan, selama ini KPK menghibahkan sejumlah barang rampasan milik terpidana korupsi untuk mobil dinas di pemerintah daerah, kepolisian resor, atau kejaksaan.

Proses penyerahan barang hasil rampasan cukup panjang. Kemenkumham harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, lalu kemudian akan ditindaklanjuti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, Kemenkeu akan memberi persetujuan dan akan diproses oleh KPK terkait serah terima barang rampasan tersebut.

"Ini adalah salah satu upaya KPK melakukan upaya pengembalian aset negara dari terpidana korupsi,"

Irene Putrie, Koordinator UK LABUKSI KPK

Irene mengatakan, kedua mobil yang dihibahkan secara dasar hukum adalah barang-barang rampasan yang sudah menjadi milik negara, sehingga tidak perlu ada keraguan akan digugat di kemudian hari. Jika ada yang menggugat, maka KPK akan secara langsung turun tangan untuk mengurus gugatan asal barang rampasan yang telah dihibahkan ke Rupbasan ●



INTEGRITO/SRP

PELAYANAN- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kecamatan Senen, Jakarta.

“Setiap daerah diharapkan saling terintegrasi dan mendukung optimalisasi penerimaan di daerahnya masing-masing,”

Asep Rahmat Suwandha,
Koordinator Unit Kerja dan Supervisi Pencegahan KPK

RAPAT KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK

DARI PERLUAS KOMITMEN HINGGA CEGAH KORUPSI

Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke-10 provinsi dari sebelumnya yang hanya 24 provinsi melalui kegiatan Rapat Koordinasi & Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Rabu, 1 Februari 2018, di Gedung Merah Putih KPK.

KPK memiliki beberapa poin yang menjadi fokus dalam upaya pembenahan di sepuluh provinsi tersebut. Poin-poinnya adalah mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, penerapan tambahan penghasilan pegawai, pembenahan teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan dana desa, pelaporan gratifikasi & LHKPN, penguatan partisipasi masyarakat, dan pembenahan dalam hal sumber daya alam.

Setelah rapat ini, KPK akan melakukan dengan melakukan pemetaan di 10 daerah tersebut

untuk mendapatkan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk membuat rencana aksi (renaksi) yang berisi langkah-langkah perbaikan.

Kemudian pada 6 Februari 2018, KPK menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta yang dihadiri oleh 34 Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Ibu Kota Provinsi yang terdiri dari kepala dinas terkait Penerimaan Daerah dan Perizinan.

Koordinator Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan *monitoring* di sektor pemasukan atau pendapatan daerah sangat penting untuk pencegahan korupsi.

“Setiap daerah diharapkan saling terintegrasi dan mendukung optimalisasi penerimaan di daerahnya masing-masing.”

Dalam sambutannya, Guber-

nur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan pengalamannya saat didampingi KPK ketika mengelola pendapatan daerah. Bukan merasa takut malah justru meningkatkan penerimaan daerah.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mengawal revisi PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan akan ada perubahan mengenai penerimaan daerah. Direktur Jenderal Badan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang mewajibkan seluruh kepala daerah untuk menerapkan transaksi non tunai.

“Presiden berharap pada tahun 2020 seluruh daerah sudah 100 persen menerapkannya,” ujar Anies.

KPK-KASN TINDAK LANJUTI NOTA KESEPAHAMAN

Akselerasi Aparatur Sipil Negara Bebas Korupsi



INTEGRITO/MM

“Perlu rencana implementasi yang konkrit dan berdampak masif untuk menjadi solusi bagi persoalan yang ada.”

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK

KASN-KPK – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menekankan kepada perwakilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap MOU terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (01/02).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar pertemuan guna meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Kali ini dengan menciptakan pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Ketua KASN Sofian Efendi, Komisioner KASN Wayulo, Komisioner KASN Tasdik Kinanto, dan anggota tim KASN.

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membahas upaya tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU) antara KPK dan KASN yang telah disepakati pada 16 November 2017 lalu yang berkaitan Dengan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara KPK

dan KASN dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam serangkaian tindakan untuk mencegah korupsi melalui penguatan pengawasan implementasi kebijakan manajemen ASN yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Nota Kesepahaman tersebut bukan hanya sebatas perjanjian namun bisa di realisasikan.

“Perlu rencana implementasi yang konkret dan berdampak masif untuk menjadi solusi bagi persoalan yang ada”, ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 1 Februari 2018.

Dalam MoU tersebut ada tiga poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi yakni, pendidikan/ sosialisasi antikorupsi, pertukaran data atau informasi, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagai upaya tindak lanjut,

KPK dan KASN akan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi seperti mendorong pembangunan budaya integritas di lingkungan internal KASN, menyelenggarakan pendidikan atau sosialisasi antikorupsi untuk meningkatkan kapasitas pegawai KASN dan bersama-sama melakukan identifikasi praktik terbaik di internasional terkait pengawasan terhadap penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta implementasi sistem merit.

Selain itu, KASN juga akan meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi bagi internal KASN.

Dengan hadirnya Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menciptakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas sehingga dapat mendukung pelayanan publik dengan baik.



ILUSTRASI--
Kegiatan pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

TOPINFORMASI.COM

NOTA KESEPAHAMAN KPK – BPJS KETENAGAKERJAAN

Bersama Berantas Korupsi Dalam Pelayanan Tenaga Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) digedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2/2018). Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Penasihat KPK Budi Santoso, Penasihat KPK Sarwono Sutikno, Direktur Utama BPJS-TK Agus Susanto, Direktur Umum BPJS-TK Naufal Majfudz, Direktur Investasi BPJS-TK Amran Nasution, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS-TK Sumarjono, dan Direktur Kepelembagaan BPJS-TK E. Ilyas Lubis.

KPK dan BPJS-TK membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam sebuah memorandum of understanding (MoU). MoU merupakan kerjasama antara KPK dan BPJS-TK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses tata kelola pelayanan BPJS Tenaga Kerja.

Dalam MoU tersebut, KPK

“Gangguan seperti ini yang harus kita berantas bersama karena membuat banyak pihak tidak bahagia.”

Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK

akan mendampingi jajaran Direksi BPJS-TK dalam mengelola dana operasional sebesar 320 Triliun Rupiah untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Direktur BPJS-TK Agus Susanto mengatakan kerja sama ini adalah bentuk pengawalan dan pengawasan KPK terhadap BPJS-TK dalam kebijakan dan dukungan pelaksanaan tugas kelembagaan secara kredibel dan akuntabel.

“Tercatat 45 juta peserta dengan jumlah peserta aktif 26,5 juta. Tentunya ini perlu pengawalan yang serius agar tata kelola di BPJS Ketenagakerjaan benar-benar lebih baik dan kredibel. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk melakukan kerja sama,

koordinasi dalam rangka menciptakan tata kelola yang (*good governance*” ujar Agus.

Upaya pendampingan yang dilakukan KPK terhadap BPJS-TK untuk mengawal jalannya pelayanan masyarakat dengan dana operasional yang sangat besar agar terhindar dari korupsi dan segala intervensi terhadap BPJS-TK.

Salah satu intervensi yang diadakan Direksi BPJS-TK adalah adanya upaya intervensi atas sebuah kebijakan baru yang diciptakan jajaran Direksi BPJS-TK yang dapat menghemat 300 miliar rupiah. Namun dengan keputusan tersebut rupanya ada pihak yang tidak berbahagia dan tidak mendukung.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihak yang mengintervensi adalah oknum-oknum yang sedang dicari KPK, karena pihak tersebut sedang mencari celah untuk korupsi.

“Gangguan seperti ini yang harus kita berantas bersama karena membuat banyak pihak tidak bahagia,” ujar Saut®

BANDIT BERDASI; Korupsi Berjamaah



Korupsi merupakan fakta sosial, ekonomi, politik dan budaya yang telah mengurita dalam kehidupan politik di dunia. Korupsi telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, menghancurkan moral bangsa dan menimbulkan kemiskinan yang absolut dan terstruktur.

Korupsi tidak hanya memporak-porandakan perekonomian bangsa, tetapi juga telah merusak moral masyarakat, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan elit politik terhadap masyarakat.

Melalui buku "Bandit Berdasi; Korupsi Berjamaah" Suhartono W. Pranoto mencoba mendeskripsikan dan menganalisis kejahatan papan atas yang dalam istilah mutakhirnya disebut sebagai Bandit Berdasi (BB) atau White Collar Crime yang telah meresahkan bangsa ini.

Kejahatan semacam ini merupakan kejahatan yang luar biasa ganas karena dapat melumpuhkan dan melemahkan semua sendi dan aspek kehidupan. Istilah KUHP atau Kasih Uang Habis Perkara bahkan muncul dalam masyarakat karena melihat fenomena betapa tidak adilnya jika ada penjahat kelas bawah yang dihukum dengan berat sementara koruptor yang memiliki uang bisa bebas tanpa hukuman yang setimpal.

Kejahatan yang dilakukan para Bandit Berdasi merupakan kejahatan yang diwariskan oleh budaya feodal yang kemudian dilestarikan oleh budaya neo-feodal, sehingga korupsi menjadi bagian yang integral dan terbesar dari para elit yang masih berkembang dan eksis sampai saat ini.

Buku ini mendeskripsikan bagaimana membe-

Penulis :

SUHARTONO W. PRANOTO

Penerbit :

KANISIUS

Kolasi :

216 HLM.; 26,5 CM.

Tahun Terbit :

2008

Bahasa :

INDONESIA

Judul Buku :

**"BANDIT BERASI ; KORUPSI
BERJAMAAH"**

rantas warisan budaya korupsi dengan perspektif filsafat kebudayaan, karena mengingat bahwa kebudayaan hanya bisa dilawan dengan kebudayaan juga (counter culture).

Penulis yang merupakan Guru Besar Ilmu Sejarah di Universitas Gajah Mada pada tahun 1995 ini menutup bukunya dengan jawaban atas pemberantasan korupsi melalui pendekatan budaya yang dilakukan pemerintahan SBY-JK dengan program 100 harinya. Buku ini akan sangat representatif terhadap bangsa Indonesia yang "sakit kemiskinan" yaitu dalam rangka melepaskan diri dari budaya korupsi yang telah menyebabkan bangsa ini berada dalam krisis berkepanjangan yang kunjung menemukan jalan keluar ●

Negeri Melawan Korupsi

Salah satu masalah yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Ini merupakan rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Pemberantasan terhadap korupsi adalah komitmen seluruh elemen anak bangsa dalam rangka mewujudkan negeri yang bersih, bebas dari korupsi dan berwibawa. Oleh karena itu perlawanan terhadap korupsi akan terus diupayakan tanpa mengenal kata henti dalam mewujudkannya.

Buku Negeri Melawan Korupsi menghadirkan sesuatu yang berbeda. Dalam buku ini terangkum sketsa berpikir siswa dan mahasiswa Indonesia di dalam merumuskan masalah dan solusi secara bersama dalam rangka menuntaskan penyakit "akut" di negeri ini: korupsi.

Buku ini merupakan buku pertama yang dibuat oleh Komunitas Mahasiswa dan Siswa Anti Korupsi (Mahasaksi) Indonesia. Di dalamnya berisi mengenai kompilasi gagasan siswa dan mahasiswa di Indonesia mengenai korupsi untuk membangun kesadaran dalam gerakan serta perumusan ide-ide pemberantasan korupsi.

Buku ini sangat menarik, karena terdapat beragam persoalan yang luput dari pantauan kita. Sebuah sudut pandang lain yang disuguhkan melalui argumentasi ilmiah dari para penulis muda yang terdiri dari siswa dan mahasiswa yang bahkan tidak terlihat dan terpikirkan oleh masyarakat. Padahal beberapa contoh kasus dan pandangan yang digambarkan dari buku ini merupakan ladang korupsi yang sangat rentan dan tidak terlihat. Dengan apik penulis-penulis ini mengungkapkan fakta dan menawarkan solusi untuk memberantas korupsi dari sisi generasi muda. Sebuah masukan yang baik untuk pemerintah.

Langkah yang diambil oleh para pemuda yang dituangkan penulis terbagi dalam beberapa hal taktis seperti mobilisasi pada media sosial di dalam memakmurkan suhu pemberantasan korupsi, pencarian peran terhadap perempuan di dalam wilayah pemberantasan korupsi di lingkup birokrat, logika dokter dan pasien di dalam menjalankan transaksi



Penulis :

M. REZA S ZAKI S.H./LL.B & Komunitas

Mahasaksi

Penerbit :

BULAKSUMUR VISUAL

Tahun Terbit :

2012

Kolasi :

127 hlm; 21 cm.

Bahasa :

INDONESIA

Judul :

NEGERI MELAWAN KORUPSI

medis, membongkar kemandekan korupsi dalam praktek anggaran di parlemen, sampai metode pemberantasan korupsi di era populis seperti saat ini.

Kesimpulan dari kompilasi gagasan ini adalah bagaimana Indonesia mampu menemukan format sebagai "Negara" yang terjepit di dalam lingkaran multisektor yang sudah melanda bangsa ini sejak VOC hadir di Nusantara. Kondisi aktual yang tidak bisa terlepas dari peran-peran politik transaksional juga bisa menjadi borgol bagi pegiat antikorupsi.

Indonesia harus mencoba melakukan gagasan besar bahwa bisa jadi korupsi di Indonesia tidak kunjung usai karena kita melupakan sisi pencegahan yang nyatanya memiliki efektivitas lebih serius dibandingkan harus membawa koruptor ke meja pengadilan. Negeri Melawan Korupsi adalah gambaran lengkap dengan segala logika kebenarannya mengenai kondisi negeri ini dari sisi yang kurang menjadi perhatian di mata masyarakat●

SUKU KAJANG, SULAWESI SELATAN

JUNJUNG TINGGI KESEDERHANAAN

BARISAN WANITA DENGAN PAKAIAN SERBA HITAM TERLIHAT SEDANG BERJALAN SAMBIL MEMBAWA KERANJANG YANG TERBUAT DARI ANYAMAN. TANPA ALAS KAKI, MEREKA BERJALAN TANPA TAKUT AKAN KERIKIL DAN TANAH YANG AKAN MENEMPEL DI TELAPAK KAKI MEREKA. PAKAIAN SEWARNA MEMBUAT SEMUA ORANG TAMPAK SAMA DAN SETARA, ITULAH SUKU KAJANG DI DESA AMMATOA YANG SEDERHANA



Desa Ammatoa terletak di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Bulukumba, 200 Kilo meter arah timur kota Makassar. Desa Ammatoa terletak di daerah Kajang. Daerah tersebut terbagi dua secara geografis: Kajang Dalam atau yang disebut “Tau Kajang” dan Kajang Luar yang disebut “Tau Lembang”. Kajang Dalam dihuni oleh masyarakat Desa Ammatoa yang tak tersentuh listrik. Sedangkan Kajang Luar sudah menerima pelayanan listrik.

Belum adanya pelayanan listrik yang sampai ke sana, bukan karena infrastruktur yang tak memadai. Suku Kajang yang menolak masuknya listrik ke desa, karena ingin terus hidup dalam kesederhanaan. Mereka menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Menurut mereka teknologi membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka dan dapat merusak kelestarian alam.

Setiap hari masyarakat Desa Ammatoa menggunakan bahasa Konjo sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Konjo termasuk bahasa Makassar yang berkembang dalam masyarakat Tana Toa (Bulukumba). Pada umumnya masyarakat di daerah tersebut tidak pernah merasakan bangku pendidikan secara formal. Maka sangat sulit menemukan masyarakat

yang bisa berbahasa Indonesia.

Walaupun sangat jarang masyarakat Ammatoa yang bisa berbahasa Indonesia, mereka memiliki struktur kelembagaan seperti di daerah-daerah lain. Bahkan semua individu yang mempunyai posisi dalam struktur kelembagaan tersebut, melaksanakan amanah secara jujur, tegas dan konsisten. Mereka mengerti makna tugas dan tanggung jawab.

Kondisi ini bisa tercapai karena mereka memiliki semboyan ‘Kamase-mase’ yang artinya adalah kesederhanaan. Semboyan ini selalu mereka pegang teguh untuk menjaga pesan dari leluhur mereka.

Pasang ri Kajang, merupakan pedoman hidup masyarakat Ammatoa yang terdiri dari amanat leluhur mereka. Pasang mengandung berbagai ajaran leluhur untuk menuntun manusia agar selalu berbuat baik, hidup jujur, dan sederhana.

Suku Kajang juga menjunjung tinggi norma kejujuran. Salah satu ritual adat yang menjadi implementasi dari Pasang diatas adalah ritual Attunu Panroli. Ritual ini adalah ritual memegang linggis panas yang biasanya dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat suatu masalah.

Misalnya jika ada kasus pencurian di Desa

Ammatoa, seluruh masyarakat dan tersangka pencurian harus berkumpul di sebuah lapangan tempat upacara adat itu di gelar. Upacara tersebut akan dipimpin langsung oleh ketua adat.

Setelah semua masyarakat adat dan mereka yang dicurigai sebagai pencuri sudah berkumpul, linggis pun mulai dibakar dalam api yang membara hingga linggis berubah menjadi warna kemerahan. Setelah besi sudah sangat panas, pemimpin ritual akan mengingatkan kepada masyarakat yang hadir, linggis ini tidak akan terasa panas jika dipegang oleh orang yang bersifat jujur.

Dengan terus meyakini semboyan 'Kamase-mase' dan penerapan pengadilan hukum adat, masyarakat Suku Kajang hingga kini tidak ada yang berani melanggar aturan atau berani mengambil hak yang bukan miliknya. Mereka menekankan untuk hidup dengan kesederhanaan dan menjaga alam sekitarnya dengan sebaik-baiknya.

Suku Kajang, hidup dengan mengelola sumber daya yang berasal dari hutan secara mandiri. Padahal wilayah Desa Ammatoa hanya berjarak 50 kilometer dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Pengelolaan secara mandiri ini, terus dipertahankan kerana mereka memiliki pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi.

Setiap akhir tahun, masyarakat adat suku kajang melakukan ritual andingingi yang berarti mendinginkan. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur mereka atas kemurahan alam dengan cara mendinginkannya. Waktu tersebut adalah saatnya alam untuk diistirahatkan setelah dikelola dan dinikmati hasilnya selama satu tahun.

"Anre kalumanyng kalupepeang, Rie' Kamase-masea". Artinya: "Di tempat ini (kawasan adat Ammatoa), tidak ada kemakmuran. Yang ada hanya kebersahajaan". Hal ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Ammatoa yang menganggap kehidupan ideal itu adalah kehidupan yang sederhana dan 'cukup'.

Segala kesederhanaan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Kajang. Setiap hari, semua masyarakat Ammatoa mengenakan pakaian yang serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki.

Pakaian hitam tersebut memiliki makna kebersahajaan, kesederhanaan, kesamaan



INDONESIAYAYA.COM

...masyarakat Ammatoa yang menganggap kehidupan ideal itu adalah kehidupan yang sederhana dan 'cukup'.

atau kesetaraan seluruh masyarakatnya. Warna ini dipilih juga untuk mengingatkan mereka kepada kematian. Warna hitam juga menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Sekaligus memiliki makna kelestarian hutan yang harus dijaga sebagai sumber kehidupan.

Selain kesederhaan dalam penampilan, bentuk bangunan rumah di Desa Ammatoa juga tampak sama. Model, ukuran serta warnanya terkesan seragam. Di kawasan Desa Ammatoa, pengunjung tidak akan menemukan satu *pun* rumah yang berdinding tembok.

Rumah-rumah yang ada di Desa Ammatoa tidak berbeda jauh dengan bentuk rumah adat suku Bugis. Bedanya setiap rumah di Ammatoa dibangun menghadap kearah barat. Membangun rumah melawan arah terbitnya matahari dipercayai mampu memberikan berkah bagi Desa Ammatoa •



INDONESIAYAYA.COM



KATEGORI UANG JAJAN TABUNGAN

Pertanyaan

Sebelum jadi pegawai negeri, saya dapat uang jajan dari orang tua yang saya tabung. Tabungan itu belum saya pakai hingga sekarang. Apa harus dilaporkan juga di LHKPN?

Dita, Jakarta

Jawaban:

Sebaiknya dilaporkan dengan keterangan bahwa sebagian nilai rekening yang ada di tabungan adalah hibah dari orang tua ●

Aset Belum Dibalik Nama

Pertanyaan:

Apakah semua aset atas nama saya harus dilaporkan? Soalnya saya punya tanah atas nama saya, sekarang jadi atas nama adik saya, tapi belum dibalik nama. Apa harus tetap dilaporkan?

Abram, Yogyakarta

Jawaban:

Untuk aset seperti ini sebaiknya dilaporkan di LHKPN tapi ada catatan bahwa aset ini sudah dijual tapi belum dibalik nama, jadi kalau terkena *sampling*, nanti jelas dalam akta jual belinya dan sudah berganti kepemilikannya ●

Waktu Perbaharui Lhkpn

Pertanyaan

Saya jadi pegawai negeri sudah tujuh tahun, sudah pernah lapor tapi belum saya perbaharui. Kapan waktunya memperbaharui LHKPN?

Titin, Bogor

Jawaban:

Sesuai dengan ketentuan, seseorang yang sudah melaporkan LHKPN, harus memperbaharui laporan dua tahun sekali dalam jabatan yang sama. Atau pada saat ia promosi, mutasi, atau memasuki usia pensiun ●



GRATIFIKASI JASA

Pertanyaan:

Bagaimana mengukur gratifikasi berbentuk jasa?

Meuthia, Bekasi

Jawaban:

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan Pasal 128 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dan, jasa termasuk kategori fasilitas lainnya. Penerimaan gratifikasi akan masuk ke dalam kategori yang wajib dilaporkan atau dilarang apabila penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pertanyaan

Gebrakan KPK mengatur gratifikasi di kalangan dokter saya acungi jempol. Saya rasa

ATURAN GRATIFIKASI DOSEN

KPK juga perlu menggebrak gratifikasi di kalangan dosen. Apakah KPK sudah mengatur hal ini?

Icha, Bengkulu

Jawaban

Tidak bisa dipungkiri ada bentuk gratifikasi yang diterima dokter ataupun pihak lainnya termasuk di kalangan pendidik dan dosen. Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK akan bergerak ke semua sektor termasuk sektor pendidikan. KPK sudah melaksanakan pengendalian gratifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ini tentu akan terus dilanjutkan ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi sehingga penerimaan gratifikasi yang dilarang bagi para dosen dapat dikendalikan dan dihapuskan.

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan melalui surel: integrigo@kpk.go.id

Jaminan Penawaran E-Tendering

Pertanyaan

Dalam pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada ayat (7), di poin a disebutkan dalam pelaksanaan e-Tendering tidak diperlukan jaminan penawaran. Apakah hal ini justru membuka peluang penyimpangan?

Tama, Depok

Jawaban

Tidak diberlakukannya Jaminan Penawaran dalam pelaksanaan e-tendering dimaksudkan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyedia barang/jasa untuk turut serta dalam proses pelelangan. Selain itu, selama ini banyak dijumpai kesalahan-kesalahan yang tidak substansial dalam penyusunan atau pembuatan Jaminan Penawaran dan mengganggu proses pelaksanaan lelang itu sendiri. Potensi adanya pelanggaran atau penyimpangan baik persekongkolan dalam proses pelelangan maupun pelanggaran etika pengadaan lainnya dapat diantisipasi melalui pemberian sanksi daftar hitam. Ketentuan pemberian sanksi daftar hitam bagi Peserta Lelang/Seleksi yang melanggar ketentuan tetap diberlakukannya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Investigasi Perusahaan Fiktif

Pertanyaan

Berkaca dari fakta bahwa adanya perusahaan fiktif pada kasus korupsi UPS di Pemprov DKI terdahulu, apakah LKPP pernah membentuk tim khusus utk melakukan investigasi terhadap perusahaan yang diduga fiktif?

Dedi, Surabaya

Jawaban

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP tak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap suatu perusahaan yang diduga fiktif. Namun demikian LKPP dapat membantu menelaah dan memberikan pendapat/rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum atau Aparat



Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki kewenangan investigasi yang di maksud

Perbedaan RUP

Pertanyaan

Bagaimanakah konsekuensi jika ada paket pengadaan yang tidak ada di RUP tetapi ada di pelaksanaannya? Sebaliknya, bagaimanakah konsekuensi jika ada paket pengadaan yang ada RUP tapi tidak ada di pelaksanaannya?

Tari, Palu

Jawaban

Saat ini Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah terintegrasi sehingga tidak dimungkinkan terdapat paket pengadaan yang dilaksanakan tanpa tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Realisasi atas pelaksanaan paket pengadaan yang ada di SiRUP sepenuhnya merupakan wewenang Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi selaku pengguna anggaran.



FOTO-FOTO: WIKIPEDIA

SELANDIA BARU

NEGARA DENGAN IZIN USAHA TERCEPAT DI DUNIA

TAK HANYA MENEMPATI POSISI PUNCAK DALAM CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) DI DUNIA. SELANDIA BARU JUGA MENEMPATI POSISI TERATAS UNTUK TAHUN KEDUA BERTURUT-TURUT SEBAGAI PERINGKAT NEGARA DI DUNIA YANG MENJADI TEMPAT TUJUAN BERBISNIS PALING MUDAH, MENURUT LAPORAN DOING BUSINESS 2018 YANG DIKELUARKAN BANK DUNIA.

Ada sebelas indikator yang menempatkan Selandia Baru pada posisi teratas, yaitu, kemampuan untuk memulai bisnis, menangani izin konstruksi, mengakses listrik, mendapatkan kredit, melakukan perdagangan lintas batas dan membayar pajak.

Negara ini mendapatkan skor tinggi dalam membangun kebijakan soal perizinan usaha. Seluruh aturan yang berhubungan dengan perizinan usaha, dapat ditemukan dengan mudah di situs pemerintah.

Dalam memulai usaha, Selandia Baru menempati posisi puncak dalam segala aspek: hanya butuh satu prosedur dan bisa selesai dipenuhi dalam waktu setengah hari.

“Selandia Baru merupakan negara dengan izin usaha tercepat di dunia,” tulis majalah Forbes.

Jika dibandingkan di antara negara-negara maju, waktu memperoleh izin usaha Selandia Baru sangat kilat. Di Jerman misalnya, seseorang butuh waktu 15 hari untuk menyelesaikan izin usaha, dan di Jepang hingga 22 hari kerja.

Selandia Baru mampu menduduki peringkat pertama karena membebaskan retribusi pemeriksaan saat mengurus pajak. Dengan kebijakan seperti ini, Bank Dunia menilai urusan pajak di negara tersebut jadi lebih mudah.

Negara ini juga menempati posisi teratas terkait dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, pengajuan kredit, dan perlindungan terhadap investor minoritas.

Selain singkatnya proses perizinan, akses keuangan di negara tersebut pun menjadi satu indikator penilaian. Kemudian, pada penilaian lainnya, regulasi investor minoritas pun jadi bahan pertimbangan yang cukup memberikan nilai lebih bahwa para investor minoritas harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor kelas kakap.

Dalam laporannya, Bank Dunia menulis beberapa hal yang dilakukan Selandia Baru yang membuat perizinan di sana semakin mudah. Dalam proses mendapatkan jaringan listrik misalnya, Selandia Baru memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan pemantauan pembayaran dan proses konfirmasi dalam proses pengerjaan koneksi listrik.

Untuk pelaksanaan kontrak, negara ini membuatnya lebih mudah dengan meningkatkan sistem manajemen kasus.

“Ini dilakukan untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan murah jika terjadi masalah,” tulis Bank Dunia.

Pembayaran pajak di sana juga lebih murah karena Selandia Baru membuat pajak le-

bih murah untuk perusahaan dengan mengurangi tarif pajak penghasilan badan. Untuk mengatasi kepaillitan, negara ini punya prosedur reorganisasi dengan tujuan memberikan alternatif likuidasi.

Jawara dalam proses perizinan usaha ini diraih Selandia Baru sejak tahun 2016. Negara penghasil kiwi ini mengalahkan juara bertahan selama satu dekade: Singapura.

Tak perlu ditanya lagi tentang transparansi di negara ini. Salah satu yang membuat perizinan begitu mudah di sana adalah adanya transparansi pelayanan publik yang terjaga. Sehingga publik bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal tanpa perlu memberi pelicin apalagi ‘lewat belakang’.

Praktek inilah yang menutup pintu korupsi di sana. Terbukti dengan skor CPI Selandia Baru yang tak pernah bergeser dari angka 90-91, dengan peringkat puncak sejak tahun 2012. Unikny, Selandia Baru tak pernah punya lembaga tunggal pemberantasan korupsi.

Kemajuan Ekonomi Selandia Baru

Perekonomian negara Selandia Baru bertumpu pada perdagangan hasil laut sejak abad ke-19. Pada awal tahun 1970-an Selandia Baru mengalami kemerosotan perekonomian yang sangat drastis, keadaan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang berakibat pada berkurangnya permintaan dunia terhadap barang-barang primer Selandia Baru dan tersendatnya akses Selandia Baru ke dalam pasar Inggris setelah terbentuknya Uni Eropa.

Standar kehidupan di Selandia Baru mengalami keruntuhan berada di bawah Australia dan Eropa Barat, dan pada tahun 1982 Selandia Baru memiliki pendapatan per kapita yang paling rendah di antara negara-negara maju yang disurvei oleh Bank Dunia. Sejak tahun 1984, pemerintah-pemerintah penerus di Selandia Baru berurusan dengan restrukturisasi ekonomi makro (yang pada mulanya dikenal sebagai Rogernomics dan kemudian berubah menjadi Ruthanasia), secara cepat mengubah Selandia Baru dari ekonomi yang sangat





Pembayaran pajak di sana juga lebih murah karena Selandia Baru membuat pajak lebih murah untuk perusahaan dengan mengurangi tarif pajak penghasilan badan.

proteksionis menjadi ekonomi pasar bebas.

Walaupun Selandia Baru sangat bergantung kepada perdagangan internasional. Sehingga Selandia Baru rentan terhadap harga-harga komoditas internasional dan resesi global. Namun, sektor pertanian, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, yang berasal dari sumber daya alam (SDA) unggulan di negara ini mampu menjadi industri penting yang mendunia.

Cermin Negara Maju Berbasis Pertanian

Kemudahan melakukan izin usaha nyata berpengaruh ke semua bidang ekonomi, salah satunya pertanian.

Negara subtropis yang memiliki kesan asri dan indah ini mempunyai kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia. Selandia Baru, dikenal memiliki hamparan lahan berbukit dan landai. Negara ini merupakan contoh nyata salah satu negara yang berhasil me-

majukan kehidupan petani dan peternak.

Faktor lain yang menentukan keberhasilan negara agraris Selandia Baru ialah kesadaran dan kecintaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam. Di Selandia Baru terdapat suatu gerakan pengelolaan lahan atau *landcare* yang merupakan proses revolusioner dalam pengelolaan lahan, melibatkan petani dan kelompok sosial masyarakat yang bersifat sukarela.

Gerakan *landcare* dibuat untuk menyelesaikan masalah seperti erosi tanah, rusaknya lahan basah, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga prinsip utama *landcare* adalah teknologi tepat guna, kelompok komunitas lokal yang efektif, serta kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memastikan bahwa gagasan dan inisiatif dapat dibagi dan disebarluaskan.



DARIUS SINATHRYA

MELAWAN KORUPSI DENGAN KARYA

Melawan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat seni dan karya. Darius Sinathrya, Produser dari rumah produksi Night Bus film bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) membuat sebuah film bertema anti-korupsi. Film ini diambil dari kisah nyata siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Solo yang sempat viral di tahun 2008.

Lewat kisah ini, Darius menyampaikan pesan untuk melawan korupsi lewat sebuah persembahan bertajuk “Melawan Diam”. Night Bus Pictures yang menggarap film “Melawan Diam” pernah meraih penghargaan tertinggi dalam Festival Film Indonesia dalam kategori film terbaik atas film Night Bus yang rilis ditahun 2017.

Tim integrito menemui Darius saat Gala Premiere yang digelar di Djakarta Theater, 8 Desember 2017. Pemutaran film pendek berdurasi 40 menit itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sekretaris Jendral TII Dadang Trisasongko. Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa Night Bus Pictures mau mengangkat isu antikorupsi?

Saat ini sudah bukan lagi waktunya menunjukkan apa itu korupsi tapi sudah saatnya kita melawan. Jadi perlawanan itu yang mau di tampilkan, rasa marahnya akan sesuatu yang tidak benar dan tidak adil, itu yang mau kami angkat. Makanya kami coba rumuskan sama – sama, kami coba buat jadi fiksi, kami tawarkan dan ikut lelang di Transparency International Indonesia (TII).

Ternyata, setelah penilaian dari internal TII kami diumumkan sebagai pemenang tendernya. Di sana kami baru duduk bareng lagi untuk memperdalam apa yang memang menjadi pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam jangka panjang nanti.

FOTO: FOTO: ISTIMEWA

Sutradara kami, Emil yang mengusulkan tentang kisah siswa SMA 3 Solo. Setelah membaca *brief* dari TII, rasanya kok cocok.

Mengapa memilih untuk mengangkat kisah siswa SMA 3 Solo?

Kalau kasus korupsi pasti banyak, tapi yang bentuknya berupa perlawanan dan berhasil ya kisah ini. Kami mau menunjukkan yang melawan dan berhasil. Biasanya kalau perlawanan itu berakhir dengan gagal dan tragis, ini melawan dan berhasil. Bahkan efeknya besar sekali waktu itu di Solo, sampai ke DPRD, sampai ke Pak Jokowi waktu masih jadi wali kota Solo, ramai dibicarakan di media, dan semangat itu yang ingin disampaikan oleh sutradara kami.

Kami harus bicara tentang semangat perlawanan, dengan caranya yang akhirnya berhasil. Itu yang membuat kami yakin bahwa kalau menasar generasi muda ya pas banget, karena ini dilakukan oleh anak-anak SMA.

Saya saja enggak kebayang waktu SMA saya ngapain. Tapi ini ada anak-anak SMA yang melakukan perlawanan, berpikir secara sistematis, mencoba menguak sesuatu yang sulit sekali di lingkungan sekolah. Dan ternyata yang ini bisa membuktikan kalau mereka berhasil.

Kisah ini memang mengadaptasi kisah nyata, namun ada beberapa *scene* yang diubah demi kepentingan film, bagian mana yang diubah?

Ya pasti, dalam sebuah dramatis cerita pasti harus ada penyesuaian apalagi kita bermain di durasi yang cukup pendek ya. Mungkin enggak bisa menceritakan keseluruhan ceritanya.

Contohnya salah satunya kalau dicermati di dalam cerita enggak ada kegiatan belajar mengajar di kelas karena itu pasti akan nambah durasi sementara mungkin pesan yang disampaikan enggak butuh harus ada di ruang kelas gitu.

Jadi seolah-olah mereka bertiga ya ceritanya waktu istirahat sekolah, waktu pagi sebelum masuk sekolah atau setelah pulang sekolah jadi seolah-olah mereka berempat ini enggak pernah ikut kelas. Tapi itu jadi satu pilihan yang harus mengisi 40 menit itu dengan alur

yang bisa berjalan dengan baik tapi pesannya juga sampai.

Mengapa harus film pendek?

Target film ini sebenarnya adalah sosialisasi, kebetulan medium yang digunakan adalah lewat film. Medium ini dipilih karena dianggap paling efisien, karena film kan bercerita. Kalau film panjang pasti prosesnya, biayanya pasti lebih besar. Sementara kalau diputar di bioskop kalau hasil dari dua film yang terdahulu responsnya enggak sebanyak film-film yang beredar. Jadi akhirnya, film pendek pun bisa menjadi medium pesan yang kuat, apalagi kalau dibawa roadshow ke sekolah-sekolah, ke institusi-institusi lebih pas dengan kebutuhannya.

Mengapa mau berpartisipasi dengan proyek yang dibuat oleh TII?

Jadi begini, kita kan generasi yang muda, hehehe. Jadi secara enggak langsung pasti punya tanggung jawab juga dan ketika dikasih kesempatan berkarya untuk menyuarakan yang seperti ini jarang-jarang juga, ruang kita untuk berkarya seperti itu kan terbatas untuk mengangkat isu-isu seperti ini. Ini pertama kalinya kita membuat film dengan tema seperti ini. Film pertama kita sebelumnya yaitu *Night Bus*, yang kemarin menang FFI itu mengangkat tema tentang kemanusiaan, tentang konflik, tentang korban. Ya mungkin secara enggak langsung kalau dilihat dua karya ini, ada nilai-nilai yang berbeda.

Dengan dua karya yang mengangkat sebuah isu sosial, apakah rumah produksi *Night Bus* ingin menjadi rumah produksi khusus mengangkat isu-isu sosial?

Enggak secara spesifik pasti, tapi *Night Bus* punya *concern* yang tinggi terhadap isu-isu tersebut. Karena selain tentang film diskusi kita memang ke arah-arah politik dan sebagainya. Tapi kalau bicara karya itu sangat luas. Kami bikin juga isu-isu yang berkaitan dengan remaja yang lebih umum misalnya dalam karya *web series*. Mungkin kalo bisa dilihat ada “pulang-pulang ganteng” itu tentang tukang cukur muda yang berjuang untuk kehidupannya dengan segala permasalahan. Ada nilai-nilai yang coba disampaikan. Kami punya penulis yang bernama Raha Bimandra, dia punya karakter tulisan yang kuat dan bisa membuat skenario dengan pesan yang tanpa menggurui.

Apa pesan yang disampaikan lewat film “Melolak Diam”?

Film ini menyampaikan pentingnya kesadaran supaya kita tidak acuh, mulai sedikit lebih peduli, mengawasi apapun itu di lingkungan yang paling kecil di diri kita, keluarga, lalu masyarakat. Walaupun saya sendiri juga mengalami kesulitan kalau sudah berhadapan dalam kondisi sehari-hari apapun dan kadang kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani kita.

Kadang situasi yang membuat kita berat untuk mengatakan tidak, akhirnya kita harus berkompromi dengan hal itu. Tapi di sisi lain kita sadar kalau hal itu tidak boleh dilakukan.

Mudah mudahan film Melolak Diam ini bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan, bahwa kita mungkin pernah terlibat dalam hal-hal yang berbau kompromi terhadap hal negatif, tapi sekarang sudah waktunya kita untuk lebih memperhatikan.

Apa pesan yang mau anda sampaikan untuk generasi muda di Indonesia agar terus semangat dalam melawan korupsi?

Saya melihat mayoritas anak zaman now ini udah mulai acuh memang. Jadi konspirasi untuk membuat generasi kita menjadi generasi yang apatis dan acuh itu sudah mulai berhasil. Jadi mereka lebih peduli dengan kehidupan pribadi, dengan *lifestyle*, dengan hal-hal yang berjarak sekali dari kehidupan sosial walaupun menurut mereka itu adalah kehidupan sosial, tapi ada kehidupan sosial yang lebih besar yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang jadi kewajiban kita untuk menjaga itu. Tapi rasanya mayoritas sudah mulai enggak peduli

dan lebih peduli hura-hura, senang-senang, tapi masih banyak anak muda yang memiliki pemikiran yang kritis dan mau bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, bangsa yang lebih bermartabat dan beradab, masyarakatnya lebih sejahtera di semua lapisan. Mudah-mudahan dengan film ini nantinya bisa membuat yang menonton tersentuh dan terketuk hatinya sehingga dia bisa menularkan semangat ke teman-teman atau lingkungan yang lebih besar lagi ●



| |
|---|
| NAMA LENGKAP |
| DANIEL SIMEON DARIUS SINATHRYA KARTOPRAWIRO |
| PRESTASI |
| 2007 - 2011 |
| Presenter sport terfavorit Panasonic Gobel Awards |
| 2010 |
| Juara 1 piala asia futsal bersama tim nasional futsal Indonesia sebagai manager tim |
| 2017 |
| Produser film Night Bus, peraih penghargaan film terbaik piala Citra di festival film Indonesia tahun 2017 Aktris Terbaik Sagamoviefest |

DISKUSI PUBLIK DEWAN PERS “GERAKAN ANTI-POLITIK UANG”

Ajak Semua Pihak Awasi Praktik Politik Uang



ISTW

Dewan Pers mengingatkan wartawan dan masyarakat untuk menolak politik uang dan segala bentuknya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Peringatan ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar dengan tema Politik Uang Dalam Pilkada 2018, akhir Januari lalu.

Sebagai lembaga yang menaungi pers di Indonesia, Dewan Pers mengajak seluruh masyarakat untuk memantau, melaporkan, dan mengintervensi setiap praktik politik uang. Tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya mengandalkan masyarakat, lembaga ini juga mengamati proses persiapan Pilkada serentak 2018 yang digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Dewan Pers menemukan adanya praktik menyimpang dalam proses demokrasi.

Salah satu temuannya adalah de-

“Kami punya wewenang untuk mencegah dan menindak politik uang yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah.”

Fritz Edward Siregar,
Anggota Bawaslu

ngan menerima sumbangan lebih dari maksimal yang ditentukan, menerima sumbangan dari berbagai lembaga dan negara asing, dan menebar atau menjanjikan uang maupun barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilih.

Hal ini sudah disikapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melakukan gerakan antipolitik uang

di 171 titik Pemilihan Kepala Daerah.

“Kami punya wewenang untuk mencegah dan menindak politik uang yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Hall Dewan Pers, Selasa, 30 Januari 2018.

Gerakan ini, kata dia, akan digelar oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota dalam rangka menolak politik uang. Bentuknya, berupa deklarasi di kantor Bawaslu bersama calon kepala daerah yang akan diminta menandatangani pernyataan secara tertulis. Bawaslu juga akan mengajak Komisi Pemilihan Umum dalam gerakan ini.

Fritz berharap dapat memberikan dorongan moral kepada para calon kepala daerah untuk menggunakan dana yang benar dan sah sesuai dengan aturan perundangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)●

PENOBATAN TOKOH PUBLIK ANTIKORUPSI

Jurnalis Yang Menyuarakan Antikorupsi

Indonesia Corruption Watch menobatkan pembawa acara Talkshow “Mata Najwa”, Najwa Shihab sebagai Tokoh Publik Antikorupsi 2017. Penobatan tersebut berdasarkan hasil penyaringan 44 tokoh dari berbagai latar belakang, seperti penulis, aktivis, hingga aktor.

Koordinator ICW, Adnan Topan mengatakan pemilihan Najwa Shihab sebagai Tokoh Publik Antikorupsi 2017 tak lepas dari perannya baik sebagai pribadi yang menjalankan profesinya di dunia jurnalistik maupun sebagai pribadi yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

“Kami tidak pernah dengar Najwa yang aneh-aneh dalam kehidupan pribadinya, di samping itu ia terpilih karena seorang tokoh itu harus berdiri di posisi yang tinggi untuk bisa di dengar,” kata Adnan.

Lebih jauh Adnan menjelaskan bahwa Najwa bukanlah sekedar seorang pembawa acara melainkan jurnalis yang menyuarakan antikorupsi.

Najwa juga dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Pengikutnya di media sosial mencapai total 8 juta orang.

Mantan Panitia Seleksi KPK, Betty Alisjahbana, sebagai salah satu juri mengatakan, keputusan memilih Najwa adalah proses yang cukup panjang.

“Kami berharap siapapun dan apapun profesinya, bisa bergerak untuk pemberantasan korupsi,” kata dia.

Sementara itu, Najwa yang menerima penghargaan tersebut merasa kaget dan sempat menangis kala mendapat kabar bahwa dirinya terpilih menjadi Tokoh Publik Antikorupsi 2017, ia mengatakan masih banyak tokoh yang jauh lebih layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Menurut dia, jurnalisisme dan korupsi itu adalah hal yang berkebalikan. Jurnalisisme berbicara mengenai kejujuran dan integritas, sedangkan korupsi tercedera oleh nilai-nilai kejujuran dan integritas itu sendiri. Ia merasa seorang jurnalis yang menyuarakan antikorupsi adalah sebuah kewajaran. Perbedaan-

**“Kami berharap
siapapun dan
apapun
profesinya, bisa
bergerak untuk
pemberantasan
korupsi.”**

Betty Alisjahbana,
Panitia Seleksi KPK 2015 - 2019

nya dengan aktivis ialah terkait masalah kode etik dan asas-asas jurnalistik.

Terakhir ia mengutip apa yang dikatakan oleh Walter Lipmann, seorang penulis Amerika yang pernah dua kali meraih Pulitzer: There can be no higher law in journalism than to tell the truth and to shame the devil.

“Berpihak pada gerakan anti-korupsi, bagi seorang jurnalis, bukanlah pilihan yang masuk akal, melainkan memang pilihan satu-satunya,” kata Najwa ●



INTEGRITO/SRP

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2017

Butuh Kerja Lebih Keras Berantas Korupsi



INTEGRITO/POY

Transparency International Indonesia (TII) menggelar deklarasi Corruption Perception Indeks (CPI) 2017 pada 22 Februari 2018. Deklarasi yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, ialah hasil pengumuman resmi yang diperoleh dari Transparency International (TI) yang bermarkas di Jerman.

Pengumuman ini sekaligus momen penanda bagi ulang tahun ke-25 Transparency International. Hasil skor di 180 negara mengungkapkan terjadi penurunan. Indonesia sendiri mendapatkan skor stagnan alias tetap di angka 37 dan menempati peringkat ke-96. Seperti kita ketahui bersama, skor CPI berada pada rentang 0 -100, di mana 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup dan 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi.

Sementara itu, secara global, skor rata-rata CPI negara-negara di dunia pun tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015 yaitu berada di angka 43. Adapun skor rata-rata untuk negara-negara di Asia Pasifik adalah 44 dan di ASEAN adalah 41. Sebanyak 106 dari 180 negara (60 persen) memiliki CPI di bawah rata-rata, termasuk Indonesia. Pada posisi lima besar ASEAN, Indonesia harus rela berada pada posisi terakhir, dengan Singapura yang menempati posisi pertama (skor 89), di susul Brunei

Darussalam (skor 58), Malaysia (skor 49), dan Timor Leste (skor 35).

Dikutip dalam laman resmi Transparency International, untuk menghentikan arus pasang melawan korupsi dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, meski diketahui ada upaya untuk memberantas korupsi di seluruh dunia, sebagian besar negara bergerak terlalu lamban dalam usahanya.

Pada tahun 2017, indeks komposit dalam pengukuran CPI bertambah satu, yaitu pengukuran dari Variety of Democracy Project di mana Indonesia memperoleh skor 30. Negara yang ikut dalam pengukuran CPI pun bertambah, dari 176 negara menjadi 180 negara. Kedua hal tersebut diyakini menjadi salah satu faktor stagnannya skor CPI dan menurunnya peringkat CPI Indonesia.

“Apabila Indonesia konsisten bekerja memberantas korupsi, maka pada tahun 2040 Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat 5 besar dunia untuk angka CPI terbaik,” ujar Chair of Executive Board TII, Felia Salim.

Terdapat dua rekomendasi yang disampaikan TII untuk KPK yaitu penguatan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian dalam usaha pencegahan serta pemberantasan korupsi;

“...pada tahun 2040 Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat 5 besar dunia untuk angka CPI terbaik,”

Felia Salim,
Chair of Executive Board TII

serta penguatan kelembagaan KPK melalui optimalisasi anggaran, kemampuan, dan jumlah personel untuk mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Perlu diingat kembali pada Integrito Vol6 2017, TII meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2017 yaitu rata-rata nasional 60.8 dengan rentang nilai 10 – 100. Dalam rubrik Khusus yang ditulis secara rinci itu pun menjelaskan bahwa Corruption Perception Index (CPI) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan hal yang berbeda. Keduanya berbeda secara metodologi dan jumlah responden.

Pengukuran CPI dilakukan oleh Transparency International (TI), dengan survei di tiga kota besar bagian barat, tengah, dan timur yang dianggap paling mewakili Indonesia. Hasil CPI berlaku untuk nilai persepsi korupsi satu negara.

Sementara IPK, yang baru mulai diukur sejak 2004 dilakukan oleh TII di dua belas kota di Indonesia yang dianggap paling mewakili Produk Domestik Bruto (PDB), ibu kota provinsi, dan mewakili tiga bagian di Indonesia. Hasilnya berlaku sebagai nilai persepsi korupsi sebuah kota bukan negara, baru di rata-rata secara nasional.●

EKSPRESI

SEJAK LAMA KORUPSI TELAH JADI PERSOALAN SANGAT SERIUS DI INDONESIA. GERAKAN PERLAWANAN DILAKUKAN DI SEGALA LINI. PUISI JADI SALAH SATUNYA. FESTIVAL ANTIKORUPSI BALI 2017 ANGKAT TEMA PUPUTAN LAWAN KORUPSI. KOLABORASI INI MENGHASILKAN BUKU KUMPULAN PUISI, "MENGUNYAH GERAM (SERATUS PUISI MELAWAN KORUPSI)", BERIKUT LIMA PUISI INI BICARA:

Surat Dari Putri

Oleh: Porman Wilson Manalu

bapak, hidup putri begitu enak
ke sekolah pakai mobil mewah
uang jajan lebih banyak
tapi pak, putri tak sekolah lagi
malu diejek anak koruptor

teman-teman sekolah
yang selalu putri traktir
nonton maupun shopping
ikut tak sekolah juga
malu dibilang teman anak koruptor

bapak ibu guru saban bulan
aktif terima upeti
plus bonus akhir tahun
tak mengajar lagi
malu dicap guru anak koruptor

melalui surat ini ananda sampaikan
penjaga sekolah tak terlihat
kabarnya mereka takut
karena terima uang pelicin
bapak,
saat ini sekolah melompong
papan nama tumbang
malu menyang
sekolah anak koruptor

putri tak bisa berbuat lagi
ke luar rumah seperti dikebiri
di dalam rumah malu sendiri

pak, maafkan putri

(medan, 260217)

Sedikit Saja

Oleh: Luh Putu Udayati

dan delapan arah mata angin
memuja kesetiaanmu
pada profesi lahir batin

tersandung kemolekan ragawi
kau biarkan diri tenggelam
pada konspirasi tubuh dan napsu dan
uang

mencuri waktu di sela jam kerja
buat mencumbu perempuan bukan
istri

sedikit saja, lenguhmu
ya, sedikit saja,
lama-lama menjadi gunung

Jalan Karma

Oleh: Dewa Jayendra

lihatlah, butiran gerimis melukis luka
tangis bayi tanpa mata
adakah tanya menghampiri
jemarimu yang sejenak terdiam
memikirkan kesunyian

pikirkanlah karma bumi
pada kitab-kitab jalan sunyi
jangan biarkan debu ilusi
mengakrabi jiwa dalam lumpur
penuh dosa

jadikan setiap tindakan
sebagai pengabdian
maka jalan cahaya
adalah kedamaian

November 2017

Kita di Negeri Kura-Kura

Oleh: Yuanda Isha

di negeri kura-kura
kau tak perlu bangun lebih
awal dari matahari
tak perlu memburu tuhan-
tuhan
santai saja. Nikmati janji para
tuan

di negeri kura-kura
tak diperlukan cerdas
sebab jika cerdas kau akan
tindas
cukup pintar saja. Maka na-
mamu akan tenar

lihaaat!
ada pulau yang diobral dalam
konser pasar loak. kemarin
ada juga tanah-tanah petani
yang sekarang menjulang
tinggi
menjadi gedung-gedung
atau, ibu kota yang kehilangan
ibu?
kau bisa melihat semua dalam
negeri kura-kuraku

lalu apa lagi yang kurang,
teman?
harusnya kau bangga dengan
negerimu ini!
di antara petinggi edan yang
menjual keadilan!

Tanjungpinang, 25 Mei 2017

Melawan Korupsi

Oleh: Tudekamatra

Puisi melawan korupsi

Ide bagus!

Melawan korupsi yang kian menjadi
dengan sihir mantra penyair

Sayang sekali

Koruptor tak pernah membaca puisi

Sebab, mereka lebih suka

menghitung rupiah dari proyek abal-
abal,

menimbun untung dari akal-akalan

Timbang membaca sajak-sajak

yang tak bermata uang

Melawan korupsi

Hanya ada satu kata:

Hukum mati!

(2017)

TAHUKAH?

PRESIDEN TERMISKIN DI DUNIA

Tahukah? Politikus di seluruh dunia, termasuk di Indonesia biasanya memiliki gaya hidup yang mewah. Apalagi seorang yang memimpin negara, Presi-



CBCCA

den. Biasanya kehidupannya berbeda 180 derajat dari pada rakyatnya. Tidur dan tinggal di tempat yang mewah, menyantap sajian yang mewah, serta ke mana-mana menggunakan mobil atau pesawat dinas yang mewah.

Namun, hal tersebut tidak berlaku oleh mantan Presiden Uruguay, Jose Mujica. Sejak dilantik menjadi Presiden pada tahun 2010, pria kelahiran 1935 tersebut layak mendapat predikat Presiden termiskin di dunia.

Jose Alberto Mujica Cordano bukan hanya dikenal dengan julukan Presiden termiskin didunia, namun ia juga dikenal sebagai orang yang murah hati. Jose selalu mendonasikan 90 persen gajinya untuk rakyatnya. Sebanyak 12 ribu dollar AS atau hampir 120 juta rupiah didonasikan untuk berbagai kegiatan amal.

Pria yang akrab dipanggil Pepe tersebut juga menolak menggunakan rumah dinas dan mobil dinas yang mewah. Mujica lebih memilih untuk tinggal di rumahnya yang memiliki peternakan. Bahkan, jalan menuju kediamannya saja belum dilapisi aspal.

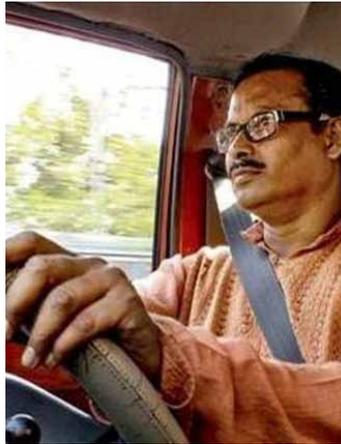
Tidak seperti Presiden negara lain yang memiliki perlindungan ketat dari Paspampres, Pepe hanya didampingi oleh dua polisi dan satu anjingnya yang hanya memiliki tiga kaki.

Pepe mengaku bahagia dengan apa yang dimilikinya. Hal itu berangkat dari pengalamannya mendekam di penjara selama 14 tahun ●

18 TAHUN TAK MEMBUNYIKAN KLAKSON

Tahukah? Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan wisatawan saat berkunjung ke India adalah suara klakson yang memekik telinga. Klakson sering kali dibunyikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena senggolan antarkendaraan.

Namun, hal berbeda diyakini oleh salah satu pengemudi yang berasal dari kota Kolkata. Dia adalah Dipak Das, pengemudi yang tidak pernah membunyikan klakson seka-



DETIK.COM

lipun selama 18 tahun terakhir. Das merasa, seorang supir tanpa klakson akan menjadi lebih waspada, karena sang supir harus menyediakan ruang antarkendaraan satu sama lain, mengatur kecepatan dan waktu, sehingga klakson tidak perlu digunakan.

Tindakan Das dianggap dapat menginspirasi pengemudi lain untuk jarang menggunakan klakson demi mengurangi polusi suara di India.

Untuk itu, Das menerima penghargaan Manush Sanman dari pemerintah India. Penyelenggara Manush Mela (Humanity Fair) telah memverifikasi etika mengemudi Das yang aman dan nyaman. Selain itu, pengemudi yang biasa menjadi supir selebriti di India ini juga terkenal dan dihargai oleh orang di sekitarnya dan organisasi tempat ia bekerja ●

BATIK BERTEMA KORUPSI

Tahukah? Perlawanan terhadap korupsi bisa dilakukan dengan banyak cara. Selain sebagai karya seni, batik juga turut digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Seperti batik yang diciptakan oleh seorang maestro batik Cirebon, Katura AS. Pria yang berasal dari Desa Trusmi tersebut menciptakan batik dengan tema korupsi. Ide tersebut muncul saat Katura melihat berita tentang penangkapan Setya Novanto dan drama melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Katura hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan batik ciptaannya.

Batik yang diciptakan oleh Katura diberi judul "Kro Ter Kornas" yang berarti kronologi tertangkapnya koruptor nasional. Dalam karya batik tersebut, digambarkan seekor garuda sedang mencengkram seekor tikus besar. Hal tersebut merupakan gambaran KPK sebagai seekor garuda yang sedang menangkap koruptor kelas kakap yang digambarkan menjadi seekor tikus besar. Tikus besar diartikan koruptor yang memakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat banyak, seperti tersangka dalam kasus korupsi



LPUTANG.COM

E-KTP.

Selain itu tergambar pula tikus-tikus kecil yang mengartikan para koruptor lain yang sedang menunggu untuk dicengkram oleh KPK. Katura menjelaskan, karya selebar 70 cm dan tinggi 90 cm itu merupakan dukungan moril di awal 2018 agar Indonesia bersih dari koruptor ●



RGIBAIK

KHUSUS

KRITIK ASYIK LEWAT MUSIK

Ismail Marzuki melawan saat Belanda mengambil-alih Radio Republik Indonesia (RRI) dan menggantinya dengan nama Radio Omroep In Overgangstijd (ROIO) pada akhir 1946. Ia menolak gaji besar, mobil, dan fasilitas lain yang ditawarkan Belanda saat itu. Pria kelahiran 1914 ini memilih hengkang dan mengkomposisi lagu-lagu perjuangan dan nasionalisme ketimbang bekerja sama dengan penjajah.

Melalui karya-karyanya, Ismail Marzuki menggelorakan semangat para pejuang untuk terus mempertahankan martabat bangsa. Ia mencipta lagu pertama kali tahun 1931, saat usianya 17 tahun, berjudul O Sarinah.

Banyak sekali karya Ismail yang masih bergema hingga saat ini. Sebut saja Gugur Bunga, Rayuan Pulau Kelapa, dan Indonesia Pusaka. Ada pula lagu berbahasa Sunda:

Panon Hideung.

Ia menciptakan lagunya di tengah masa penjajahan yang penuh pertempuran, jauh dari ketenangan. Lagu, adalah bentuk perjuangan Ismail Marzuki. Tak heran ia dinobatkan menjadi penulis lagu nomor satu di Indonesia, menurut majalah Rolling Stone edisi Februari tahun 2014, di antara seratus penulis lagu terbaik di bumi pertiwi.

Memilih lagu sebagai bentuk perjuangan masih menjadi pilihan beberapa musisi. Tanpa mementingkan laku atau tidaknya lagu, mereka terus berkarya menyuarakan perjuangan. Bukan soal pertempuran, bukan pula soal perlawanan terhadap penjajah.

Perjuangan musisi saat ini melalui lagunya adalah menyuarakan kondisi sosial di sekitarnya. Tujuannya satu: membuat Indonesia jadi lebih baik.



RAS MUHAMMAD

Sebar Hal Positif Lewat Reggae

Muhamad Egar atau yang dikenal dengan nama Ras Muhamad memiliki pandangan bahwa musik bisa dijadikan medium untuk edukasi dengan cara mengajak penikmat musiknya untuk bercermine, berpikir, dan melihat kenyataan dunia. Musisi beraliran *reggae* ini merasa musiknya harus bisa menyadarkan dan menggerakkan pendengarnya.

Ia selalu menghargai setiap musisi yang membuat musik dengan pesan kampanye sosial. Tak peduli soal laku atau tidak.

“Saya berharap ia mengerjakannya dengan tulus ikhlas, terpanggil oleh ilham, dan bukan untuk mencari perhatian atau pujian,” ujar pria berambut gimpal yang memulai karirnya di Brooklyn itu.

Ras percaya musik memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Maka akan sangat bermanfaat jika seorang seniman membuat karya yang juga menyampaikan isu sosial lewat sebuah karya yang berkualitas. Bukan sekadar mencari hits yang mudah dicerna dan dijual.

Dari album pertama Ras Muhammad

yang bertajuk “Reggae Ambassador” tahun 2007, ia begitu terus terang mengkritik dan menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang membelenggu rakyat Indonesia.

Dalam single *Make Way* di album *Next Chapter*, dengan pedas ia mengkritik sistem politik di Indonesia yang dihuni politisi pengumbar janji yang akrab dengan korupsi. Dalam lagu itu Ras Muhammad juga menggambarkan bahwa politik dijadikan arena mencari kekuasaan dan martabat dari sebuah jabatan.

“Suap-menyuap, siap dan sigap menerima lipatan dengan senyuman lebar jual-beli harga diri timbulkan polemik membutai kita dengan trik, trik, trik dimanakah hati yang jujur dan tulus”

Ras membuktikan bahwa semua karya yang dikerjakan dengan tulus, akan berbuah manis. Ia dianjar penghargaan Best Reggae Act ditahun 2008 dari Rolling Stone Indonesia.

Lain dulu, lain sekarang. Sebelum tahun 2009, Ras memang gencar untuk menyuarakan kampanye sosial dengan tema kebangsaan, keberagaman, korupsi, revolusi, alam, persaudaraan, dan isu semacam ini. Ras yang dulu adalah Ras dengan amarah yang besar terhadap ketidakadilan.

Berbeda dengan sekarang. Ia merasa kondisi saat ini sudah tak cocok lagi dengan caranya menyuarakan isu-isu tersebut. Saat ini Ras merasa lebih cocok untuk menyuarakan perdamaian, mengenai cinta dan keindahan dunia. Ras kini lebih tertarik dengan hal-hal abstrak, spiritual dan cinta.

“Saya akan tetap berkarya sesuai kapasitas, untuk menjadikan penikmat musik saya lebih baik dan terus menyebarkan hal positif lewat musik,” kata Ras.

Pria kelahiran tahun 1982 ini adalah pengagum Bung Karno. Ia selalu mengingat ucapan sang proklamator: Ibu Pertiwi memiliki konde yang harus dihiasi bunga-bunga. Ia mengartikan kata-kata tersebut dengan sangat dalam.

“Ini simbolisme luar biasa karena masing-masing pekerjaan/bunga kita harus membuat bangsa harum,” kata dia.

Maka, lanjut Ras, apapun yang dilakukan oleh seseorang, semua nilai dan derajatnya sama. Hanya aksi/tindakannya yang akan menentukan perbedaan dan nilainya, positif atau merugikan bangsa ●

SIMPONI

Lebih Suka Nyanyi Ketimbang Orasi

M Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) telah mengambil sikap sejak awal terbentuk 8 Oktober 2010 lalu. Mereka sepakat menjadi musisi yang menyuarakan kampanye sosial dan pesan positif. Beranggotakan beberapa aktivis, Simponi konsisten menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan maupun kelestarian alam kepada masyarakat luas. Musik dipilih karena sifatnya yang universal.

Beberapa kali bongkar pasang, Simponi saat ini beranggotakan Rendy Ahmad pada vokal, Zulqaini Khaiqal pada drum, Rama Prayuda Aruman pada bass, Sakti Sanjaya pada gitar dan Bayu Agni pada gitar.

Simponi berpandangan bermusik bukan hanya sebagai hiburan, tetapi harus menyampaikan pesan dan berpengaruh kepada masyarakat.

“Harus ada sesuatu yang berguna untuk pendengar kami, terutama anak muda,” ujar Rendy sang vokalis.

Lewat musik, Simponi belajar membuka mata dan peka terhadap kondisi sekitar. Saat ini Simponi sedang merencanakan untuk menggelar tur. Mereka bertujuan untuk mengajak para generasi muda untuk berdiskusi dalam setiap penampilan mereka. Lebih dari 10 kota pada tahun ini yang akan didatangi dengan membawa isu perdamaian.

“Isunya lebih spesifik supaya pesannya bisa lebih sampai, ini juga masih hangat dan jadi perhatian di Indonesia,” ujar pria yang juga seorang

aktor dalam film “Sang Pemimpi” ini.

Rendy kemudian bercerita mengenai dampak positif dari setiap tur yang mereka gelar. Musik yang mereka mainkan adalah satu alasan untuk memulai diskusi tentang negeri ini, mengenai isu yang mereka utarakan lewat musik. Ternyata banyak anak muda yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Simponi mengenai isu-isu yang menjadi tema dalam lagu Simponi.

Simponi mengakui membuat sebuah lagu berbalut pesan sosial atau yang bermuatan kritik untuk bangsa ini terasa lebih sulit dibandingkan sebuah lagu cinta yang sederhana. Alasannya, karena sebagian anak muda jaman sekarang kurang suka dengan lirik yang terlalu berat walaupun masih ada beberapa anak muda yang justru menyukai musik dengan pesan sosial bahkan kritik di dalamnya.

Tantangan ini tak membuat Simponi berhenti, malah menjadi pelajaran dan tugas bagi Simponi untuk mengemas lagu bermuatan pesan sosial menjadi menarik dan mudah diterima.

“Makanya pe-er kami ke depan, untuk membuat musik yang agak ringan dan umum. Kalau bisa enggak *to the point* kritik sosial tapi sebenarnya itu kritik sosial. Mungkin di album ke-4 akan kami realisasikan,” ujar Rendy

Hingga kini Simponi masih menyuarakan kampanye sosial dan pesan positif. Alasannya, musik lebih mudah disukai dan dimengerti dari orasi. Apalagi dengan kemasan lirik dan tema lagu yang keren●



TONY Q RASTAFARA

Musik dan Sebuah Revolusi Kesadaran

Kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Apakah ini akan jadi slogan belaka

Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia

Mungkin akan menjadi dongeng

Kong Kali Kong – Tony Q Rastafara

Berlangganan koran dan banyak berdiskusi mengenai politik dan isu yang terjadi di negeri ini menjadi salah satu inspirasi Tony Waluyo Sukmoasih atau yang biasa dikenal Tony Q Rastafara dalam menciptakan lagu berisi kritik sosial berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Penggalan lagu Kong Kali Kong dari Tony Q Rastafara yang menceritakan bagaimana sebuah korupsi terjadi berakibat dari kongkalikong beberapa politisi yang menyalahgunakan jabatannya. Tony adalah salah satu musisi *reggae* yang turut menyuarakan kritiknya lewat musik.

Lewat alunan musik *reggae*, Tony Q memang selalu mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan Indonesia. Selain liriknya yang ciamik, Tony Q juga memasukkan banyak unsur tradisional Indonesia ke dalam musiknya. Musisi *reggae* yang mulai berkarir sejak 1989 ini mengatakan musik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial yang ada di Indonesia.

“Saya menyebut ini sebagai sebuah revolusi kesadaran. Ya siapa tahu yang dengar lagu ini bisa berubah jadi lebih baik,” ucap

Bapak 3 anak tersebut.

Selain sebagai revolusi kesadaran, Tony juga kerap menggunakan medium musik sebagai alat kampanye untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Di setiap penampilan Tony ia selalu mengimbau fans nya untuk meninggalkan musik dengan berdamai agar tidak ada yang bermusuhan.

“Lu nonton musik nambah saudara, bukan musuh,” itulah kata-kata yang selalu Tony ucapkan sebelum bernyanyi.

Tony selalu melakukan kebaikan berdasarkan kapasitasnya, yaitu bermusik. Selain menulis tentang kondisi sosial, Tony juga menulis lagu yang berisi apresiasi dan kewajiban manusia harus saling menghargai. Ia mengatakan musik juga bisa menjadi alat untuk penyampaian pesan. Soalnya, ada lagu-lagu yang menyampaikan pesan perdamaian dengan alunan nada yang gembira. Ia menganggap ini jauh lebih efektif ketimbang pidato yang membosankan.

Dengan semua kegiatannya, Tony berharap musiknya akan membawa perubahan.

“Paling tidak saya sudah membuat sebuah catatan perjuangan versi saya,” kata dia.

Tony mengatakan lagunya adalah suara dari inspirasi yang dia dapat. Inspirasinya, dia dapat dari melihat kenyataan di sekitar. Laku atau tidak, lanjut dia, urusan belakangan. Ditolak pun tak mengapa. Sebagai seorang seniman, kata dia, sebuah karya dihasilkan dari panggilan hati.

Membuat sebuah karya yang berupa lagu dengan berbagai isu sosial dan kritik justru selalu mendapatkan tanggapan yang positif dari penikmat musik.

“Kalau dilihat di Youtube ada beberapa teman yang menggambarkan konteks pergolakan korupsi menggunakan lagu kong kali kong,” ujar pria kelahiran 27 April 1961 tersebut.

Artinya, kata dia, pesan yang ingin ia sampaikan melalui lagu itu, berhasil ditangkap oleh para pendengarnya. •

IWAN FALS

Tak Berhenti Meski Sempat Masuk Bui

Virgiawan Listanto atau yang kerap dikenal Iwan Fals selalu menjadikan suasana yang ada di negeri ini sebagai sebuah pembelajaran dan menjadikan inspirasi untuk membuat sebuah lagu. Lewat lagu-lagunya ia mengisahkan suasana sosial kehidupan yang terjadi di Indonesia sejak awal 70an. Lagu-lagu yang dinyanyikan Iwan Fals didominasi dengan kritik sosial, rasa kepedulian atau empati, dan bencana yang terjadi di Indonesia.

Walaupun musisi hidup dari musik, Iwan Fals selalu fokus membuat sebuah karya tanpa mengurus tentang keuntungan yang ia dapat dari musik. "Saya fokus bikin lagu saja. Saya lepas pasar industri, anak-anak saya yang urus," ujar pria kelahiran tahun 1961 ini. Ia hanya berharap masyarakat menghargai setiap karya yang ia ciptakan dengan tidak membajak.

Lewat musik, pria yang biasa dipanggil Iwan ini dapat menggerakkan massa dari fans fanatiknya. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemar yang tersebar diseluruh nusantara. Para fansnya bahkan mendirikan Yayasan Orang Indonesia yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 1999. Yayasan ini menjadi wadah aktivitas para penggemar Iwan Fals yang bahkan merebak ke setiap penjuru nusantara bahkan mancanegara.

"Saya enggak punya perasaan mengkritik, saya hanya membuat musik," ujar salah satu maestro Indonesia itu. Menurutnya, mengkritik pemerintah bukanlah ranahnya. Namun ia mengungkapkan bahwa musik-musik Iwan Fals tersebut karena bentuk kepeduliannya terhadap banyak orang di sekitarnya. Ia merasa tidak bisa hidup sendirian dan merasa tersentuh jika ada yang menjadi korban akibat sikap dari kaum elit di negeri ini.

Selama orde baru, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah karena lirik lagunya yang dianggap dapat memancing kerusuhan. Bahkan, beberapa lagu bisa dikategorikan terlalu "keras" pada masanya. Sampai per-

usaha rekaman bahkan tidak berani menjual lagu-lagu tersebut secara bebas. Pada April 1984, Iwan fals sempat berurusan dengan

aparatkarena menyanyika lagu Demokrasi Nasi pada sebuah konser di Pekanbaru.

Berikut penggalan lagu Demokrasi Nasi

*Anak seorang menteri
Membuat onar lagi
Menembak sampai mati
Kok nggak ada sangsi?*

*Tentu bukan sesuai dengan
undang-undang
Di negeri ini yang katanya demokrasi*

Dalam lagu tersebut, Iwan mengisahkan adanya ketidakadilan dan tidak berjalannya fungsi undang-undang dengan semestinya. Ada pengecualian terhadap orang-orang 'berduit' dan pemangku jabatan. Lagu tersebut dinilai mengkritik padahal menurut Iwan, ini hanyalah buah dari pemikirannya yang ia lihat dari kenyataan yang terjadi di masa itu. Hingga saat ini, lagu-lagu Iwan Fals masih banyak digemari dan selalu diputar di setiap kegiatan atau tayangan televisi yang sedang membahas tema yang sesuai •

INTEGRITO/SRP

RAN

Melawan Dunia untuk NICU Rangers

Musisi yang mengambil nama dari inisial nama tiga anggotanya ini percaya musik dapat menciptakan kebaikan. Tak perlu lagu dengan lirik sindiran atau kritik pedas, RAN membuat proyek pertamanya untuk menyebarkan kampanye sosial.

Melawan Dunia, mereka jadikan judul lagu yang digarap bersama penyanyi solo wanita, Yura. Mereka menjadikan lagu ini untuk menggambarkan kisah orang tua yang berjuang demi kesembuhan anaknya yang lahir dengan kelainan kromosom. Kelainan ini disebut Trisomy 13.

Adalah Ratih Megasari dan Kiagoos Herling Kamaludin dan mendiang anak mereka, Adam Fabumi. Perjuangan keluarga kecil ini sengaja mereka tampilkan di video klip *Melawan Dunia*. Tujuannya tentang pentingnya menjaga semangat dan kepercayaan akan kesembuhan untuk sang anak.

"Perjuangan dan positivisme mereka itu patut banget disebarluaskan," ujar salah satu personel RAN, Rayi.

Kisah mendiang Adam memang sudah viral sebelum RAN dan Yura membuat lagu ini.

Lagu *Melawan Dunia* pun mendapatkan resipons positif dari masyarakat. Nino mengatakan ini

bisa menjadi sebuah medium yang baik untuk mengajak masyarakat melakukan kebaikan. Dimulai dengan lagu *Melawan Dunia*, RAN akhirnya meneruskan perjuangan NICU Rangers lewat Charity Campaign #MelawanDunia.

Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Rangers adalah sebutan bagi para bayi yang mengalami kelainan sehingga harus dirawat di ruang khusus itu.

Walaupun telah berpulang 22 November 2017 lalu, perjuangan Adam menginspirasi banyak orang dan membuka mata publik tentang perjuangan NICU Rangers.

Saat ini RAN turut serta dalam gerakan yang digagas Adam Fabumi Foundation dan kitabisa.com untuk menggalang dana demi membantu biaya rumah sakit dari NICU Rangers di Indonesia. Soalnya, biaya rawat inap di NICU sangat mahal. Gerakan ini adalah bentuk kepedulian mereka terhadap bayi yang harus melewati segenap perjuangan melawan sakit di NICU.

"Secara berkala nanti setelah dikurasi oleh Adam Fabumi Foundation dan kitabisa.com, akan ada pembagian dana yang dirasa paling cepat membutuhkan. Kami kebagian tugas *berkoar-koarnya*, ketika penyalurannya itu inginnya kami turun tangan langsung," ujar Rayi.

Selain ikut dalam gerakan-gerakan itu, RAN sangat aktif mengajak masyarakat Indonesia lewat sosial media atau disaat mereka tampil, di manapun.

Musik memiliki bahasa yang universal. Lirik dan melodinya membuat isi pesan dalam lagu tersebut mudah diserap, sehingga bisa menjadi medium yang baik lewat karya sang musisi. RAN ingin menjadi musisi yang tidak hanya menghibur namun juga bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. RAN pun sepekat jika musisi memiliki peran yang cukup besar dalam perubahan karakter bangsa.

"Musik itu cara yang paling gampang untuk memberitahukan orang," kata Nino

●●



FIMELA.COM

Kejadian intoleransi yang terjadi selama tahun 2017 membuat GAC akhirnya menyuarkan pesan sosial dalam dua lagu terbarunya yaitu Suara dan Satu. GAC memilih isu ini karena melihat kondisi yang kritis di Indonesia.

“Kami bingung, sedih dan terusik saat ada yang mencoba mengkotak-kotakkan suatu golongan,” ujar salah satu personel GAC, Audrey Tapiheru.

Melalui lagu Satu, tiga anak muda ini menceritakan tentang bahagiannya saat bersama tanpa menghiraukan perbedaan. Dalam liriknya, mereka menyebut saat bersatu, api kita tak dapat dipadamkan karena tak ada yang bisa kalahkan hati.

Dalam lagu Suara, GAC juga menyampaikan bagaimana generasi muda bebas mengutarakan pendapat sesuai dengan nuraninya. Hal positif yang disampaikan GAC lewat musik ini merupakan wajah keseriusan GAC dalam berkarya. Selain menghibur, pesan sosial juga turut disampaikan dengan pembawaan yang ‘kekinian’.

“Meskipun pesannya dalam, tapi kami mau menyampaikan dengan cara yang ringan dan nyaman,” ujar Cantika Abigail.

Berbeda dengan musisi terdahulu mereka era 90an, grup musik yang mengambil nama dari nama depan para personelnnya ini tetap menyampaikan pesan dengan cara yang memang sesuai dengan target pendengar mereka: anak muda.

Penyampaian dengan bahasa yang ringan dan pemilihan kata yang memperbanyak perumpamaan dirasa lebih pas dibandingkan melalui lirik yang frontal seperti musisi-musisi lawas. GAC tetap memilih menyampaikan pesan so-

sial yang mereka bawa melalui musik RnB yang asyik untuk bergoyang. Ini mereka lakukan agar mudah diterima dan tidak terlihat menggurui dengan berisi pesan yang positif bukan lirik yang berisi kritik.

Musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapapun bisa tergerak hatinya, bahkan karena sebuah lagu masyarakat bisa tergerak dan menciptakan pengaruh yang luar biasa dimata masyarakat. Gamaliel, Audrey, dan Cantika sepakat musik bisa menjadi penggerak massa.

Menurut mereka musik adalah medium yang sangat kuat untuk mempengaruhi banyak orang. Musik dapat menggerakkan hati dan pikiran masyarakat hanya dengan mendengar atau memahami isi pesan dalam lagu tersebut.

“Kedepannya akan semakin banyak anak muda yang sadar kalo kita ini penerus bangsa, kalau kita enggak kritis dan menyuarkan, ya siapa lagi?” ujar Gamaliel Tapiheru ●

GAC

Lagu Kekinian Untuk Intoleransi

INTEGRITO/SS

*"Ku bisa tenggelam di lautan
Aku bisa diracun di udara
Aku bisa terbunuh di trotoar jalan
tapi aku tak pernah mati
Tak akan berhenti"*

Efek Rumah Kaca (ERK), *band* yang sudah aktif dari tahun 2001 dikenal dengan musik yang tidak biasa dan lirik yang cerdas. Cholil Mahmud, Airil Nur Abadiansyah, dan Akbar Bagus Sudibyo tidak pernah membuat musik yang bertujuan khusus untuk menggerakkan massa. Mereka bermusik dan menuliskan lirik yang berisi isu sosial karena merasa itu hanya cerminan kehidupan sehari-hari yang kita alami.

"Ada sekelebat pikiran dan opini kita terhadap hal-hal tertentu. Nah, itu bisa jadi lagu" ujar sang vokalis, Cholil.

Musik adalah sebuah saluran untuk mengekspresikan pendapat musisi. Namun, bukan sekadar mengutarakan pendapat, musik dapat menjadi awal mula sebuah diskusi yang dapat menyadarkan khalayak.

"Kayak jadi ada diskusi selanjutnya setelah orang dengar lagunya, apakah orang sependapat atau enggak sependapat" ujar Cholil.

Musik dianggap bisa menggerakkan massa. Namun nyatanya hal itu tergantung dengan pribadi masing-masing manusia. Jika musik memang dianggap penting untuk orang tersebut, maka musik bisa menggerakkan hatinya bahkan bisa berbuat sesuatu hanya karena musik.

"Gue percaya dari musik kita banyak belajar, dan kita tergerak karena dengerin musik," ujar pria yang saat ini tinggal di Amerika.

Menurut dia, setiap orang yang mendengarkan musik akan belajar, minimal me-

mahami musik dan liriknya. Hal tersebut menggambarkan bahwa musik sudah menggerakkan individu tersebut karena kecintaannya terhadap musik. Namun, sejauh mana musik bisa mempengaruhi, masih menjadi perdebatan.

Akbar justru mengatakan bahwa musik bisa menggerakkan massa seperti musisi besar Iwan Fals atau Slank yang bisa mengumpulkan massa menjadi satu kesatuan.

"Mungkin ada kesamaan atau rasa empati yang sama dengan band itu atau isu yang sama jadi massa mau bergerak," ungkap *drummer* ERK itu.

Bagi Cholil, tidak ada topik yang tidak bisa dijadikan karya seni. Namun bukan berarti dalam waktu dekat ini akan banyak musisi yang semakin banyak menyoroti isu sosial.

"Kayaknya belum, butuh waktu yang lama untuk mengembalikan bahwa seni itu bagian dari semua kehidupan sehari-hari yang bisa kita jadikan inspirasi," ujar Cholil.

Lirik-lirik cerdas untuk menyentil berbagai isu sosial ternyata bukanlah tujuan utama saat ini.

"Kami enggak pernah menyangka kalau ternyata orang-orang jadi suka sama liriknya," ujar Cholil. Mereka mengatakan selama ini hanya fokus dalam menggarap musiknya, bahkan tidak pernah mendiskusikan mengenai lirik yang dibuat Cholil.

EFEK RUMAH KACA

Inspirasi Lirik Dari Kehidupan Sehari-hari

Saat musisi lain membuat musik dengan lirik bertema pesan sosial, Glenn Fredly Deviano Latuiahmallo punya caranya sendiri. Ia menggagas Konferensi Musik Indonesia untuk pertama kalinya. Lewat tema Raya Nada untuk Indonesia, Glenn akan memperjuangkan masa depan musik sebagai salah satu industri yang menjanjikan, sebuah kepastian yang selama ini dinanti musisi dengan segala undang-undang mengenai musik yang nantinya akan dirumuskan dalam konferensi ini. Selain itu, akan banyak kegiatan dengan medium musik sebagai wujud persatuan.

“Tujuannya satu: musik akan menjadi alat pemersatu dalam membangun karakter bangsa,” ujar pria kelahiran 1975 itu.

Sebagai musisi, Glenn yakin musik bisa membawa makna dan perubahan dalam setiap hidup manusia. Musik bahkan bisa menggerakkan dan mengumpulkan massa dengan mudah dalam satu konser musik. Hal inilah yang menurut dia bisa membuat musik membawa arus massa untuk membuat suatu perubahan.

Glenn memang tidak memiliki lagu dengan muatan pesan sosial, semua lagunya tentang cinta. Namun bukan berarti Glenn Fredly tidak menggunakan medium musik untuk melakukan sebuah gerakan yang positif dan menunjukkan kepeduliannya. Glenn Fredly merupakan salah satu musisi yang aktif menunjukkan kepeduliannya terhadap bangsa ini, salah satunya terhadap isu korupsi.

Dengan menuangkan kepeduliannya dalam musik, ia ingin menunjukkan musik bukan hanya sebuah hiburan. Menurut Glenn musik bisa memberikan dampak kepada perekonomian, sosial, kebudayaan bahkan politik.

“Musik punya spektrum yang sangat luas sekali, terintegrasi dengan segala aspek kehidupan,” ujar pria kelahiran Jakarta tersebut.

Glenn yakin untuk menyampaikan pesan positif tak melulu harus disampaikan lewat lirik, tapi bisa berupa sebuah perumpamaan yang sebenarnya maknanya adalah pesan sosial. Seperti halnya isu korupsi. Musisi dapat menerjemahkan nilai korupsi dengan bahasa sehari-hari bukan dengan terang-terangan menyebut kata “korupsi” dalam liriknya.

“Bisa saja ditulis sesuatu yang mudah diterima. Karena yang paling dasar itu bagaimana kita menghargai hak orang lain dan tidak mengambilnya, itu sudah menggambarkan jangan korupsi,” ujar Glenn.

Sebuah karya musik yang berisi pesan sosial menurut Glenn akan lebih efektif jika dibantu dengan sebuah kolaborasi. Kolaborasi para musisi atau dengan pihak-pihak terkait yang bisa mendukung energi dari pesan sosial yang hendak disampaikan lewat sebuah karya yang berupa lagu ●

GLENN FREDLY

Tak Aktif Lewat Lirik, Gagasan Konferensi Musik

PENGAMAT MUSIK, BENS LEO

MUSIK MENGIKAT EMOSI PENDENGAR

Musik dipandang menjadi suatu budaya yang sudah menjadi kebutuhan semua manusia. Pesan yang disampaikan lewat lirik dan instrumennya mendarat dengan apik di benak manusia. Sebagian musisi mendedikasikan dirinya sebagai pembawa pesan sosial. Penikmat musik yang terbawa lantunan nada bisa terpengaruh hingga menghasilkan sebuah diskusi, pemikiran, kecintaan, bahkan muncul sebuah gerakan hanya karena sebuah lagu. Hingga musik dijadikan sebuah medium yang sempurna untuk menyampaikan berbagai pesan sosial. Pengamat musik Indonesia, Bens Leo menceritakan kekuatan musik kepada *Integrato* awal Februari ini.



Seberapa besar pengaruh musik dalam membawa pesan kepada masyarakat ?

Musik adalah bagian dari budaya. Setiap musisi memiliki kapabilitas untuk menyampaikan pesan-pesan lewat liriknya. Setiap musisi memiliki pandangan dan minat pada tema-tema tertentu. Ada yang memiliki minat pada lagu-lagu cinta, ada yang menyukai tema sketsa sosial, atau bahkan yang memiliki minat dengan tema lingkungan. Sejauh yang saya tahu, pesan sosial yang disampaikan lewat musik oleh musisi akan sangat kuat, apalagi jika punya kedekatan emosional dengan penikmat musik.

Dari dulu selalu ada musisi yang menyuarakan pesan sosial, hingga saat ini mulai bermunculan lagi musisi-musisi muda yang ikut menyuarakan pesan sosial. Apakah muncul sebuah kegelisahan dari musisi muda akan kondisi negeri ini atau hanya ikut tren ?

Beberapa musisi memang memiliki niat untuk menyampaikan pesan sosial tanpa mempedulikan segmen pasar. Eranya sekarang, musisi tanah air tidak hanya menyuarakan masalah sosial tapi

juga tentang kecintaan terhadap tanah air. Pada umumnya musisi muda yang menyampaikan isu sosial berada di dalam ranah indie. Ini adalah semangat kebebasan. Mereka bebas berkreasikan. Di sanalah anak-anak muda bisa bebas menyuarakan pendapat. Musisi sekarang sudah banyak yang mengambil jalur indie agar tidak terikat dengan pasar.

Seperti misalnya Efek Rumah Kaca. Banyak pesan sosial yang mereka sampaikan lewat lagu-lagunya sehingga orang yang mendengar akan menyukai lagunya. Efek Rumah Kaca berada pada ranah yang tepat yaitu berada di ranah indie, mereka tidak terkungkung oleh label rekaman.

Dalam membuat sebuah karya, apakah musisi tergantung dengan kesukaan pasar atau sebaliknya?

Musisi tidak perlu mengikuti pasar, justru kalau bisa musisi menjadi *leader* untuk pasar itu sendiri. Saya kira yang paling penting adalah prinsip untuk menciptakan sebuah komunitas dari fans yang loyal. Seperti Iwan Fals yang memiliki Orang Indonesia (OI), sebuah komunitas yang sangat besar. Hal tersebut juga sama seperti Slank dengan Slankers nya yang sudah sangat loyal. Jika musisi punya fans yang loyal, maka tidak perlu takut untuk masuk industri musik dan menciptakan sebuah karya.

Bagaimana dengan musik sebagai medium untuk menggerakkan massa?

Musik sangat mungkin untuk menggerakkan massa. Apalagi dalam menyampaikan pesan sosial. Karena kepedulian yang ada di para musisi itu murni untuk perjuangan bukan untuk masuk berita. Seperti Slank yang mengajak Slankers untuk mendukung KPK. Apalagi saat perform di depan gedung KPK, mereka bisa menggerakkan massa, bisa mengundang massa yang banyak dan menyampaikan pesannya lewat musik. Selain itu seperti Glenn Fredly, dia berjuang untuk musik. Dia ingin undang-undang musik digarap serius seperti undang-undang perfilman. Dengan apa yang dilakukan Glenn membuat sebuah Konferensi Musik Indonesia, bisa menggerakkan massa dan bisa menciptakan sinergi baru dalam dunia musik yang akan berdampak positif. Saya percaya dengan karya cipta musisi, asal itu murni dia akan bisa meng-

gerakkan massa dan pesan sosial akan sampai dengan bagus.

Termasuk untuk generasi millenials, apakah menggunakan medium musik untuk menyadarkan kondisi sosial dan menggerakkan massa masih efektif?

Masih, jika di lingkaran penikmat musik indie. Karena di sanalah sebetulnya moral untuk menyuarakan satu masalah sosial bahkan kritik yang pedas itu datang dari anak-anak indie. Kalau musisi yang dibawah label cenderung tidak bisa karena mereka memiliki sensor tak tertulis saat masuk industri musik. Tapi jika itu disampaikan, pesan itu akan sampai dengan santun. Seperti lagu-lagu Iwan Fals kan tidak ada lagu yang menohok sehingga membuat orang marah sama dia.

Musisi itu cerdas. Saya percaya musisi yang dapat menciptakan lagu bagus adalah orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi. Mereka akan tahu bagaimana cara menyampaikan pesan secara menarik.

Terlalu banyak isu yang ada di negeri ini, apakah itu akan berpengaruh pada kreativitas musisi tanah air?

Saya kira enggak, tergantung sama kesiapan musisinya. Kalo misalnya mereka punya karakter kuat dan sudah biasa menyuarakan isu sosial dia akan bertahan disana. Sebaliknya juga begitu, mereka akan bertahan di temanya masing-masing. Tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk musisi.

Termasuk jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkembangan dunia musik, mereka yang telah memiliki karakter yang sangat kuat enggak akan takut sama sekali karena mereka sudah punya fans yang fanatik.

Apakah ke depannya, musik dengan muatan kampanye sosial masih memiliki kesempatan di hati masyarakat?

Ada dua hal yang menarik. Pertama mereka yang *music lovers*, mereka menggemari lagu dengan tema-tema cinta. Tapi ada juga yang suka tema isu sosial, cinta tanah air, dan lain-lain. Setiap orang punya selera masing-masing. Musisi yang punya fans loyal, di genre apapun dan apapun isi pesan di lagunya, dia akan tetap punya fans yang fanatik●

SJAHRUDDIN RASUL

BERANTAS KORUPSI DENGAN KESEDERHANAAN

SEORANG PETUGAS PENGAMANAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG PERNAH MEM-PINGPONG PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENJADI UNDANGAN DALAM SEBUAH ACARA DI SANA. PADAHAL SAAT ITU, PIMPINAN KPK ITU TELAH MENYATAKAN INGIN BERTEMU REKTOR. INI TERJADI SANG KOMISIONER TAMPAK SANGAT SEDERHANA DAN DATANG SEORANG DIRI.

T

ak tampak seperti pejabat, pimpinan KPK saat itu dioper dari satu pintu ke pintu lain, dari satu petugas ke petugas lain. Hingga akhirnya sang rektor melihat dan langsung menyambutnya.

Adalah Sjahrudin Rasul yang ditolak saat itu. Ia menolak tawaran jemputan panitia dan akhirnya naik taksi.

Sjahrudin menjadi pimpinan KPK bersama empat pimpinan lain: Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamengkas.

Anak sulung Sjahrudin, Adriansyah mengenang sang Ayah sebagai sosok pejuang hebat yang sangat sederhana dan konsisten. Tak pernah memberi nasihat, tak pernah marah, dan menghindari pertengkaran. Hingga saat ini, ia yakin betul belum pernah bertemu orang dengan konsistensi seperti sang Ayah.

“Ayah enggak doyan duit,” kata pria yang saat ini bekerja di Kementerian Luar Negeri.

Adriansyah mengatakan sang Ayah selalu menjadi



teladan dalam hidup sederhana di keluarganya. Ia mengenang saat Sjahrudin menjabat sebagai Direktur di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat itu, kata dia, keluarganya jauh sekali dari gaya hidup mewah.

“Eggak pernah digampangin soal uang, jadi dari dulu sampai sekarang terbiasanya enggak punya uang,” kata dia kepada integrito, awal Januari lalu.

Pria yang kerap disapa Adrian ini mengatakan, dulu dia berteman dengan anak bawahan sang Ayah. Ia melihat betul betapa mewahnya gaya hidup teman-temannya. Tapi tidak dengan Adrian.

“Saya dan adik-adik cuma paham harus hemat karena Ayah tak punya cukup uang,” kata dia.

Hal serupa terjadi saat Sjahrudin menjadi kepala kantor di Kementerian Keuangan. Sjahrudin tetap menerapkan hidup hemat dan sederhana terhadap keluarganya.

“Ayah selalu bilang gajinya kecil,” kata Adrian disertai senyum.

Sjahrudin lahir di Padang 17 Agustus 1943. Adrian bercerita tentang sang Ayah yang selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas langsung merantau ke Bandung. Sjahrudin mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran. Keterbatasan uang membuatnya harus tidur di kampus.

Sang Ayah, biasanya tidur di perpustakaan atau di area kantin untuk menghemat biaya. Sampai akhirnya ia diajak untuk tinggal di rumah temannya yang kasihan melihat Sjahrudin tidak memiliki tempat tinggal. Namun hal itu terjadi dalam waktu singkat, setelah itu Udin kembali tinggal dikampus. Udin tak ingin membebani temannya terlalu lama.

“Kadang kalau lapar banget, ayah sampai harus jadi *kenek* truk,” ujar Adrian.

Kesederhanaan dan kesulitan yang dihadapi Sjahrudin saat muda, membentuknya menjadi manusia yang kuat dan konsisten. Terlihat saat dia menjadi Pimpinan KPK Jilid 1.

“Pak Sjahrudin Rasul adalah seorang birokrat yang berpikir maju, apa adanya, sederhana, serta perintis strategi pencegahan korupsi,” kata Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamengkas.

Di awal berdirinya KPK, lelaki yang biasa di panggil Rasul di wilayah kantor ini termasuk orang yang berani mengambil risiko. Ia mengajak beberapa stafnya di BPKP. Ia hanya memilih yang paling berkualitas dan berintegritas. Tujuh orang berpendidikan pascasarjana yang diajak Sjahrudin, berperan besar dalam membangun dasar dan sistem organisasi di KPK. Mereka bekerja keras meskipun harus membawa peralatan sendiri seperti laptop dan *printer*.

rakat disaat enam bulan pertama KPK berdiri. Saat melakukan sosialisasi, tidak jarang ia dicela dan dianggap omong kosong karena belum menangkap koruptor padahal sudah bergaji besar.

“Padahal waktu itu kami belum terima gaji,” kata Sjahrudin saat itu, sambil mengelus dada.

Wakil Ketua KPK 2003-2007, Tumpak Hatorangan Panggabean, punya kenangan tersendiri tentang Sjahrudin.

“Pak Tumpak, kalau sampai 6 bulan ini kita tak juga menangani perkara, saya mundur saja!” ujar Tumpak menirukan Sjahrudin.

Tumpak mengatakan, Sjahrudin selalu menjadi rekan sekaligus sahabat yang selalu memotivasi. Termasuk saat Sjahrudin menyatakan ingin mundur. Tumpak menganggap pernyataan itu menggambarkan tekad dan kobaran yang semangat yang luar biasa.

Ketua KPK Jilid 1, Taufiqurachman Ruki, tak berbeda jauh dengan Tumpak. Ia mengatakan kematangan Sjahrudin membuat lima komisioner tetap solid dan dinamis.

“Sjahrudin Rasul adalah Penyeimbang di antara kami berlima,” kata Ruki.

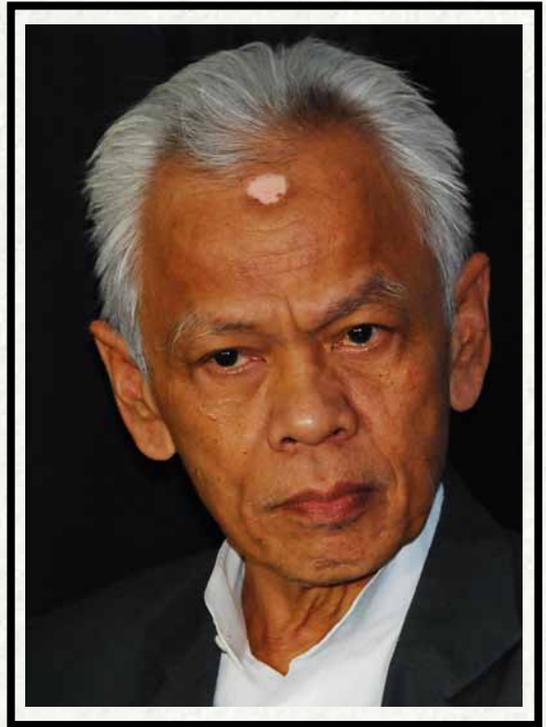
Padahal Sjahrudin pernah diragukan kemampuannya karena penampilan semata. Seleksi calon pimpinan KPK yang memasuki tahap lanjutan di Dewan Perwakilan Rakyat saat itu melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. Tidak hanya melalui metode tanya jawab secara terbuka, Komisi II DPR juga menugaskan tim investigasi datang ke tempat tinggalnya untuk melihat langsung kehidupan para calon pimpinan KPK saat itu.

Sjahrudin mendapat giliran didatangi hari Jumat. Sjahrudin, saat itu sedang pergi ke luar rumah untuk suatu keperluan. Ia hanya menggunakan kaos oblong, celana pendek dan sandal jepit.

Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut saat melihat banyak wartawan dan beberapa anggota DPR. Para tamu memandang heran saat Sjahrudin masuk ke rumahnya. Bahkan ada celetukan: ‘Kayak gini mau jadi pimpinan KPK?’

Meski banyak tamu, Sjahrudin cuek. Ia berpamitan untuk salat Jumat. Bahkan ia mengajak para tamu untuk salat Jumat. Ternyata ada beberapa yang ikut salat, ada yang memilih menunggu di rumah.

Usai salat Jumat, Sjahrudin tetap cuek. Ia mengajak para tamunya makan di warung nasi padang di sebelah rumahnya.



“Saya mau makan, bapak-bapak gimana? Apa mau ikut makan? Bayar sendiri-sendiri atau saya bayarin?” ajak Sjahrudin saat itu. Akhirnya mereka ikut makan.

Dialog malah terjadi saat Sjahrudin makan dengan apra tamunya. Para anggota Dewan itu bertanya bermacam hal. Dan yang lebih banyak disinggung, riwayat hidup dan harta benda, termasuk pemasukan.

Atas segala jasanya bersama empat pimpinan KPK jilid 1, Sjahrudin Rasul mendapatkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia “Bintang Mahaputera Utama” saat Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 64 yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus 2009 di Istana Negara.

Sjahrudin tutup usai pada Sabtu, 23 Desember 2017. Selama dua tahun terakhir, Sjahrudin yang sudah mulai sakit selalu dirawat oleh istri tercinta seorang diri. Saat ditawarkan seorang perawat untuk membantu merawat sang suami, sang istri, Asrah, menolak.

Sosok yang patut diteladani dan dihormati, akan terus tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perintis dalam aksi pemberantasan korupsi. Sikapnya, integritasnya, kesederhanaan, dan kejujurannya harus kita contoh dan kita tanamkan dalam benak kita agar dapat meraih mimpi Indonesia yang bersih dari korupsi ●

LETTO

GALAK SOAL NGANTRE

Untuk Letto, antre bukan sekadar susunan barisan manusia yang menunggu giliran. Lebih dari itu, mereka menganggap antre adalah salah satu cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai manusia.

Sang vokalis, Noe, mengantre bisa jadi penguji kejujuran seseorang. Apalagi, tak pernah ada 'wasit' yang mengawasi antrean. Tetap berlaku jujur saat tak ada pengawasan, menurut Noe, adalah integritas yang sesungguhnya.

Maka jangan berani-berani menyerobot giliran grup musik asal Yogyakarta ini. Mereka menyatakan akan sangat galak soal mengantre.

"Kalau nyerobot ya sama saja mengambil hak orang lain, korupsi itu," kata Noe yang diikuti anggukan oleh teman-teman satu grupnya.

Perilaku korupsi dari hal-hal kecil seperti ini, kata dia, menjadi cikal bakal korupsi besar yang kemudian bisa merugikan negara. Seharusnya, kata Noe, sikap permisif tak dilakukan dari hal-hal kecil.

Letto punya satu pengalaman nyata tentang serobot menyerobot saat antre. Saat mengantre, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menyelip di antara mereka. Kemudian Noe, langsung berinisiatif jadi 'wasit' dadakan.

Noe menegur dan meminta sang ibu-ibu mengikuti jalur antre yang sudah ada.

"Ibu-ibunya mengerti kok, terkadang memang ada saja orang yang enggah terlalu ngeh sama hal-hal yang dianggap sepele begini," kata dia, awal Januari lalu.

Ketidakpedulian pada hal kecil begini, kata dia, jadi penyebab merebaknya korupsi. Banyak orang yang secara sengaja mengambil hak orang lain dengan cara korupsi, namun tidak ada yang berani menegur.

"Kalau enggak ada satu orang yang berani teriak, jadinya cuma bisa ngeluh," kata Noe.

Salah satu gitaris Letto, Patub, mengatakan jika keluhan tidak akan mengubah apapun jika tidak disuarakan dengan benar. Padahal, kata dia, saat ini komunikasi sudah modern dan bisa mendorong masyarakat untuk lebih inovatif untuk menciptakan berbagai cara dalam menegakan suara anti korupsi.

"Mari kita lawan korupsi bersama, karena saya yakin masyarakat ingin agar Indonesia tambah maju dan bersih dari korupsi," kata dia ●



"Mari kita lawan korupsi bersama, karena saya yakin masyarakat ingin agar Indonesia tambah maju dan bersih dari korupsi."

KETERANGAN PALSU

Masih ingatkah kita dengan vonis penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Riau kepada bekas ajudan mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, Said Faisal, terkait kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) PON ke XVIII Riau?

Kala itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicara, Johan Budi Sapto Prabowo, mengapresiasi putusan tersebut karena terkait dengan keterangan tidak benar alias keterangan palsu. Johan mengatakan putusan ini bisa menjadi peringatan bagi siapa saja untuk tidak lagi berbohong dalam memberikan keterangan didepan persidangan pengadilan yang telah melalui sumpah.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab IX KUHP dengan judul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seperti benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pada Pasal 242 ayat (1) mengatakan bahwa, “Barang siapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

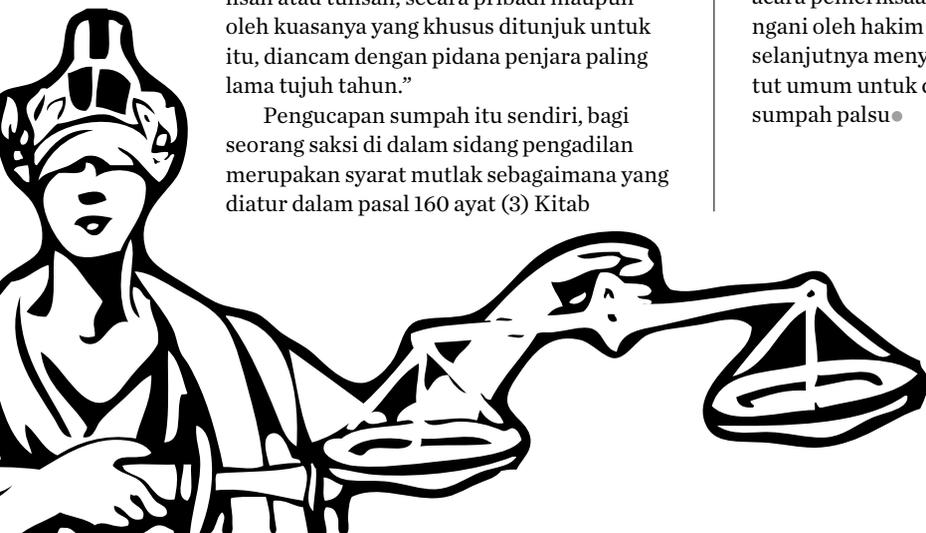
Pengucapan sumpah itu sendiri, bagi seorang saksi di dalam sidang pengadilan merupakan syarat mutlak sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 ayat (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Dalam banyak persidangan, khususnya perkara tindak pidana korupsi, banyak saksi yang akhirnya tersangkut kasus hukum karena memberikan keterangan palsu. KPK tidak menganggap enteng adanya keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Untuk itulah ancaman pidananya pun tak main-main, sebut saja Muhtar Ependy, terdakwa kasus Akil Mohtar yang divonis pidana penjara lima tahun dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan, karena memberi keterangan palsu dalam persidangan.

Seorang saksi dapat terjerat kasus keterangan palsu pertama-tama atas kejelian dan ketegasan seorang hakim untuk memperingatkan saksi apabila dirasa keterangannya tidak mengandung kebenaran atau mengadakan, akan ada sanksi pidana yang harus ditanggung.

Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka hakim ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun penasihat hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu ●



VAKSINASI DIFTERI

Jaga Kesehatan Demi Kinerja Maksimal

Kementerian Kesehatan menganjurkan vaksinasi difteri sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan meluasnya KLB (Kejadian Luar Biasa) difteri di Indonesia. Vaksinasi difteri pada orang dewasa diharapkan dapat dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti anjuran ini. Wadah Pegawai (WP) menggelar pemberian vaksin difteri, hepatitis B, dan serviks kepada seluruh pegawai KPK. Pemberian vaksin ini dilaksanakan pada Selasa (20/2) di Gedung Serba Guna KPK, Jakarta.

KPK Bergelut dengan pekerjaan sehari-hari, terkadang hampir melupakan kesehatan diri masing-masing setiap individu di KPK. Hal tersebut tentu dialami oleh setiap orang yang sibuk de-

ngan rutinitas kesehariannya.

“Atas dasar itu kami (WP) ingin mewadahi dan memfasilitasi Pegawai KPK yang ingin vaksin,” kata Aulia Sekjen WP.

Aulia menambahkan, vaksin Hepatitis B dan serviks itu juga karena banyak dari pegawai KPK yang meminta untuk dilaksanakan vaksin tersebut.

“Pelaksanaan vaksin ini guna untuk melakukan preventif terhadap ketiga penyakit tersebut, dengan tubuh yang sehat kita akan lebih semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Aulia.

Setelah dilakukan, pegawai yang divaksin disarankan untuk mencatat dan menyimpan data/riwayat imunisasi dengan baik. Jika pernah mengalami alergi atau kejang setelah kurang lebih satu minggu setelah vaksinasi, sebaiknya minta dokter

“...dengan tubuh yang sehat kita akan lebih semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”

Aulia,
Sekjen WP KPK

untuk mengevaluasi terlebih dahulu kondisi kesehatan sebelum vaksinasi difteri atau vaksinasi kombinasi lain.

Manfaat vaksin penting untuk mencegah penularan penyakit. Oleh karena itu, tepati jadwal imunisasi demi menjaga kesehatan. Menjalani imunisasi adalah bentuk pertanggungjawaban diri kita dalam menghargai kesehatan diri sendiri dan orang lain ●



INTEGRITO/MM

VAKSIN- Seorang Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah di vaksin untuk menghindari Virus difteri yang sedang mewabah.



ALEXANDER MARWATA KERJA SAMA

Seperti orang yang menyatakan beriman, tentu tak akan dibiarkan begitu saja tanpa pembuktian. Tuhan pasti akan mengujinya, sejauh mana kualitas iman seorang hamba.

Dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratunga sekitar tahun 824 Masehi, Candi Borobudur masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tak sebentar. Pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari lima ratus tahun. Ribuan balok batu yang disusun dan diukir indah ini baru selesai pada masa pemerintahan putrinya, Rati Pramudawardhani.

Proses tak pernah berbohong. Pembangunan yang sangat lama sungguh tak sia-sia. Terbukti hingga kini Candi Borobudur masih menjadi kebanggaan Indonesia.

Setara dengan bangunan sepuluh lantai, pembangunan candi ini pasti memerlukan banyak tenaga. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur dibangun dengan peralatan sederhana, seperti palu dan pengungkit. Kendaraan yang ada saat itu hanya cikar atau pedati. Iya, gerobak yang ditarik oleh sapi.

Arkeolog menemukan banyak kuali gerabah di sekitar Borobudur. Dugaannya, keluarga pekerja candi tinggal di dekat sana. Saat lelaki bekerja, warga perempuan bertugas memasak

makanan.

Sungguh kerja sama yang sangat indah. Menghasilkan karya yang juga luar biasa indah. Dengan alat yang sederhana, tentu tak mudah membangun Candi Borobudur. Kuncinya adalah kemauan, ketekunan, dan kerja sama.

Sungguh indah jika kerja sama ini bisa kita contoh untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Sulit bukan berarti tidak bisa. Candi Borobudur saja bisa dibangun dengan cara sederhana asal tekun bekerja sama.

Begitu juga dengan korupsi. Akarnya harus benar-benar tercabut supaya tak bisa tumbuh lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa mengerjakannya sendiri. Butuh kolaborasi dan kerja sama. Tak hanya dengan sesama lembaga negara, tapi juga dengan masyarakat.

Tak perlu mengangkut batu atau menarik pedati. Yang terpenting adalah menanamkan integritas dalam hati. Kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan ●

Portal Pengetahuan Antikorupsi



Langkah Cerdas Cegah Korupsi



CHARGE
PENGETAHUAN KAMU
TENTANG ANTIKORUPSI

di acch.kpk.go.id



Kau Tidak Akan Pernah Sendirian...